



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1061, 2018

KEMEN-LHK. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien perlu dibuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
- b. bahwa untuk kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan keamanan arsip, perlu adanya pengaturan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klarifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 783);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kearsipan adalah hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut arsip KLHK adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

5. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
6. Arsip Kategori Biasa adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
7. Arsip Kategori Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
8. Arsip Kategori Rahasia adalah arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
9. Arsip Kategori Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
10. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
11. Akses Tertutup adalah pembatasan ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal untuk melindungi informasi arsip dari penyalahgunaan informasi.
12. Akses Terbuka adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal untuk pemanfaatan arsip yang disediakan secara berkala, serta merta, dan setiap saat.
13. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung

maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

14. Hak Akses Arsip adalah kategori pengaturan hak akses arsip dinamis bagi pejabat yang berwenang.
15. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
17. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dimaksudkan untuk:

- a. mendorong unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib, yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
- b. memberikan petunjuk kepada unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
- d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkup Kementerian;
- b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik, dengan prinsip cepat, tepat, mudah dan aman;
- c. menyediakan informasi arsip dinamis yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik; dan
- d. menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, prasarana dan sarana.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, terdiri atas:

- a. klasifikasi keamanan arsip;
- b. pengamanan arsip; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP

Pasal 6

- (1) Klasifikasi keamanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat informasi yang terbagi dalam 4

(empat) kategori, meliputi:

- a. biasa/terbuka;
 - b. terbatas;
 - c. rahasia; dan
 - d. sangat rahasia.
- (2) Keempat ketegori keamanan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya.

Pasal 7

- (1) Klasifikasi keamanan arsip dinamis yang termasuk ke dalam kategori biasa atau terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian.
- (2) Klasifikasi keamanan arsip dinamis yang termasuk ke dalam kategori terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di Kementerian.
- (3) Klasifikasi keamanan arsip dinamis yang termasuk ke dalam kategori rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang luas sehingga dapat mengganggu kinerja Kementerian.
- (4) Klasifikasi keamanan arsip dinamis yang termasuk ke dalam kategori sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang luas hingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

BAB III
PENGAMANAN ARSIP

Pasal 8

Pengamanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. pengamanan ruangan penyimpanan arsip;
- b. penentuan pengelola arsip; dan
- c. pembuatan daftar arsip.

Pasal 9

- (1) Pengamanan arsip dalam ruangan penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. pemasangan kamera pengawas (*CCTV*);
 - b. kunci pengamanan ruangan; dan
 - c. media penyimpanan arsip.
- (2) Media penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat menggunakan:
 - a. sarana perangkat keras (*hardware*); dan
 - b. sarana perangkat lunak (*software*).
- (3) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, serta brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 10

- (1) Penentuan pengelola arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam bidang kearsipan maupun dedikasi dan integritas.
- (2) Penentuan pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Arsiparis, Pimpinan Unit Kerja dapat menunjuk pengelola arsip yang berasal dari unit kerja yang ditetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 11

- (1) Pengelola arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan pengelola arsip di Unit Pengolah, Unit Kearsipan I, Unit Kearsipan II, Unit Kearsipan Daerah dan Unit Pusat Kearsipan.
- (2) Arsiparis berperan dalam pengelolaan dan pengamanan arsip di Unit Kearsipan I, Unit Kearsipan II, Unit Kearsipan Daerah, dan Unit Pusat Kearsipan.
- (3) Pengelola arsip mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip, tetapi tidak memiliki wewenang melakukan pengamanan arsip dan menetapkan hak akses arsip.

Pasal 12

- (1) Pengamanan arsip dengan pembuatan daftar arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi pembuatan daftar arsip terbatas, daftar arsip rahasia, dan daftar arsip sangat rahasia.
- (2) Pengamanan arsip dengan pembuatan daftar arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada pada Unit Pengolah, Unit Kearsipan, Unit Kearsipan Daerah, dan Unit Pusat Kearsipan.

BAB IV
KLASIFIKASI DAN PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 13

Klasifikasi dan pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diatur dengan ketentuan:

- a. semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- b. setiap pegawai hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
- c. publik dapat mengakses informasi arsip dinamis yang dikategorikan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengguna yang diberi hak akses arsip dinamis, meliputi:

- a. pengguna yang ada di internal Kementerian; dan
- b. pengguna yang ada di eksternal Kementerian.

Pasal 15

(1) Pengguna yang ada di internal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:

- a. Menteri mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang ada di bawah kewenangannya;
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (setara Eselon I) mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya;
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya;
- d. Administrator (setara Eselon III) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya;
- e. Pengawas (setara Eselon IV), mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya; atau

- f. Pengawas Internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna yang ada di eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas:
- a. publik yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh informasi dengan kategori biasa/terbuka;
 - b. Pengawas eksternal yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Aparat penegak hukum yang mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi arsip dinamis kegiatan substantif yang dapat diakses tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Klasifikasi arsip dinamis kegiatan fasilitatif yang dapat diakses tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Klasifikasi arsip dinamis keuangan yang dapat diakses tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P. 85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ARSIP SUBSTANTIF

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
I								
KEBIJAKAN								
1		<p>Pedoman/Standar/NSPK/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis kebijakan dari kegiatan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lestari, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (P3LBB), Pengendalian dan Perubahan Iklim, Perhutanan Sosial dan Kemitraan, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, serta Pembiayaan Pembangunan Hutan.</p>	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Satker lingkup Kementerian LHK	
II								
PLA								
PLA.0								
RENCANA PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN								
1	PLA.0.0	<p>a. Perencanaan Makro Kehutanan</p> <p>1) Peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)</p> <p>2) Peta Review Arahan Pemanfaatan Skala Besar</p> <p>3) Peta Review Arahan Pemanfaatan Skala Kecil</p> <p>4) Peta Review Arahan Kawasan Rehabilitasi</p>	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DIT RPP, PKTL	Kecuali Lampiran Peta format SHP tertutup
			Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DIT RPP, PKTL	
			Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DIT RPP, PKTL	
			Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DIT RPP, PKTL	

Page 11

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		5) Peta Review Arahan Kawasan Non Kehutanan	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DIT RPP, PKTL	
		6) Peta Review Arahan Kawasan Hutan Konservasi	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DIT RPP, PKTL	
		7) Peta Review Arahan Kawasan Hutan Lindung dan Gambut	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DIT RPP, PKTL	
		8) Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Makro Kawasan Hutan Peta Kepulauan Maluku	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DIT RPP, PKTL	
		9) Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Makro Kawasan Hutan Peta Pulau Papua	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DIT RPP, PKTL	
		10) Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Makro Kawasan Hutan Peta Pulau Sulawesi	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DIT RPP, PKTL	
		11) Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Makro Kawasan Hutan Peta Pulau Kalimantan	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DIT RPP, PKTL	
		12) Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Makro Kawasan Hutan Peta Pulau Sumatera	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DIT RPP, PKTL	

Page 12

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		13) Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Makro Kawasan Hutan Pada Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DI RPP, PKTL	
		14) Laporan Review RKTN	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, dampak ekonomi makro	DI RPP, PKTL	
	PLA.0.1	b. Rencana Kawasan Hutan						
		1) Usulan Perubahan Kawasan Hutan	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI RPP, PKTL	
		2) Rekomendasi Gubernur dan Peta Lampiran	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI RPP, PKTL	
		3) Persetujuan substansi	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI RPP, PKTL	
		4) SK Perubahan Kawasan Hutan dan Peta Lampiran	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI RPP, PKTL	Kecuali Lampiran Peta format SHP tertutup
		5) Laporan Tim Terpadu	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI RPP, PKTL	
		6) Berkas Uji Konsistensi	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI RPP, PKTL	
	PLA.0.2	c. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan						
		1) Berkas permohonan (in pinjam pakai kawasan hutan (eksplorasi))	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI RPP, PKTL	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2) Berkas permohonan (in pinjam pakai kawasan hutan (infrastruktur))	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI RPP, PKTL	
		3) Berkas permohonan (in pinjam pakai kawasan hutan (operasi produksi))	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI RPP, PKTL	
	PLA.0.3	d. Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan						
		4) SK (in Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI RPP, PKTL	Kecuali Lampiran Peta format SHP tertutup
		1) Rancang Bangun Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI RPP, PKTL	
		2) Arahanc Pencadangan	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI RPP, PKTL	
		3) Usulan Penetapan Wilayah KPH	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI RPP, PKTL	
		4) Penetapan Wilayah KPH	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI RPP, PKTL	
		5) SK Penetapan KPH/KPHK dan peta lampiran	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI RPP, PKTL	
		6) SK KPHK dan peta lampiran	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	DI RPP, PKTL	
		7) SK Penetapan Wilayah Propinsi dan Peta Lampiran	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	DI RPP, PKTL	
		8) SK Penetapan Fasilitas KPH dan peta lampiran	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	DI RPP, PKTL	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
	PLA.0.4	a. Informasi spasial dan dokumentasi						
		1) SK (gn Pinjam Pakai Kawasan Hutan (eksplorasi/operasi produksi)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dit RPP, PKTL	
		2) Hasil Telaah Konfirmasi Lokasi Permohonan IPPKH	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Dit RPP, PKTL	
		3) Verifikasi calon areal IPPKH (Clearance)	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Dit RPP, PKTL	
		4) Koordinasi dan Supervisi minherba	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Dit RPP, PKTL	
		5) Klarifikasi Kawasan	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Dit RPP, PKTL	
		6) Klarifikasi Lokasi	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Dit RPP, PKTL	
		7) Laporan berkala pemenuhan kewajiban (6 bulanan) IPPKH	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	Dit RPP, PKTL	
		8) Pemberitahuan Pembayaran PNPB	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	Dit RPP, PKTL	
		9) Surat Tagihan I, II, dan III	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	Dit RPP, PKTL	
		10) Surat Peringatan I, II, dan III	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	Dit RPP, PKTL	
		11) Tagihan kelengkapan baseline	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	Dit RPP, PKTL	

Page 13

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		12) Tanggapan permohonan penundaan pembayaran	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	Dit RPP, PKTL	
		13) Tanggapan revisi baseline	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	Dit RPP, PKTL	
		14) Surat Persetujuan Revisi baseline	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	Dit RPP, PKTL	
		15) Tanggapan Berita Acara Verifikasi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	Dit RPP, PKTL	
		16) SK Penetapan KPHL/KPHP dan peta lampiran	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dit RPP, PKTL	Kecuali Lampiran Peta format Shapette tertutup
		17) SK Penetapan KPH Model (120 KPH) dan peta lampiran	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dit RPP, PKTL	Kecuali Lampiran Peta format Shapette tertutup
		18) SK Penetapan Fasilitas (114 KPH) dan peta lampiran	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	Dit RPP, PKTL	
		19) Hasil Verifikasi HKM/DHTR	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	Dit RPP, PKTL	
		20) SK Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dit RPP, PKTL	Kecuali Lampiran Peta format Shapette tertutup
2	PLA.1	INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN						
	PLA.1.0	a. Inventarisasi Hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dit IPSDH, PKTL	
	PLA.1.1	b. Pemantauan Sumber Daya Hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dit IPSDH, PKTL	
	PLA.1.2	c. Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dit IPSDH, PKTL	
	PLA.1.3	d. Jaringan Data Spasial Kehutanan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dit IPSDH, PKTL	
3	PLA.2	PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN						
	PLA.2.0	a. Pengukuhan Kawasan Hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dit KUH, PKTL	Kecuali Peta Lampiran SK format SHP tertutup
	PLA.2.1	b. Perubahan Penunjukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dit KUH, PKTL	Kecuali Peta Lampiran SK format SHP tertutup
	PLA.2.2	c. Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dit KUH, PKTL	

Page 10

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
4	PLA.3	PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR						Kecuali Lampiran peta format SHP tertutup
	PLA.3.0	a. Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PDLKWS, PKTL	
	PLA.3.1	b. Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PDLKWS, PKTL	
	PLA.3.2	c. Instrumen Ekonomi Lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PDLKWS, PKTL	
	PLA.3.3	d. Pemetaan dan Penerapan Ekoregion	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PDLKWS, PKTL	
	PLA.3.4	e. Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PDLKWS, PKTL	
5	PLA.4	PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN						
	PLA.4.0	a. Pengembangan dan Bimbingan Teknis	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PDLUK, PKTL	Kecuali softcopy dokumen dan format SHP tertutup
	PLA.4.1	b. Penerapan AMDAL, UKL-UPL, dan Ijin Lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PDLUK, PKTL	Kecuali softcopy dokumen dan format SHP tertutup
	PLA.4.2	c. Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi	Rahasta	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI PDLUK, PKTL	
	PLA.4.3	d. Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PDLUK, PKTL	Kecuali softcopy dokumen dan format SHP tertutup
III	KSA	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM						
1	KSA.0 KSA.0.0	PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM a. Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam - Paket data inventarisasi potensi kawasan konservasi (data base) - Informasi website - Buku Informasi kawasan konservasi - Modul jurnal aplikasi pembuatan peta arahan pengelolaan KK - Peta arahan pengelolaan KK (.shp) - Peta zonasi TN (.jpg) - Peta zonasi TN (.shp)	Terbatas Biasa Biasa Biasa Rahasta Biasa Terbatas	Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon II Eselon IV Eselon III	Terbatas Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Terbuka Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi - - - - Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara - Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	DI PIKA DI PIKA DI PIKA DI PIKA DI PIKA DI PIKA DI PIKA	
	KSA.0.1	b. Pemetaan Kawasan Konservasi						

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		- surat dan dokumen usulan EKF	Rahasta	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	PIKA	
		- SK Tim Teknis EKF	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	PIKA	
		- Dokumen Rencana Pelaksanaan EKF	Rahasta	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	PIKA	
		- Dokumen Hasil EKF	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	PIKA	
		- Dokumen Hasil Desk study	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	PIKA	
		- SK dan Peta Penunjukan KK	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	PIKA	
		- SK dan Peta Penetapan KK	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	PIKA	
		- Data dan permasalahan pemantapan kawasan	Rahasta	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	PIKA	
	KSA.0.2	c. Pemetaan Kawasan Konservasi - Surat dan dokumen rancang bangun KPHK - SK Blok Pengelolaan KK	Biasa Terbatas	Eselon IV Eselon III	Terbuka Terbatas	- Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	PIKA PIKA	
		- Dokumen Blok Pengelolaan KK	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	PIKA	
		- Peta Blok Pengelolaan KK	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	PIKA	
		- SK Zona Pengelolaan KK	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	PIKA	
		- Dokumen Zona Pengelolaan KK	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	PIKA	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		1) Data-data pada dokumen Analisis Risiko Lingkungan Produk Rekayasa Genetik 2) Hasil Ringkasan pengkajian Analisis Risiko Lingkungan Produk Rekayasa Genetik oleh Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik 3) Data Hasil Lapangan Uji Terbatas Produk Rekayasa Genetik	Rahasia Biasa Rahasia	Eselon II Eselon IV Eselon II	Tertutup Terbuka Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara - Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Dit KKH Dit KKH Dit KKH	
		4) Rekomendasi Keamanan Lingkungan Produk Rekayasa Genetik (PRG) dari Menteri LHK kepada Menteri/Kepala LPNK terkait Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan hayati produk 1) Data Daftar Jenis Investasi 2) Strategi dan Arahana Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Jenis Astring Invasif 3) Data kejadian pada salwa liar (konflik, penyakit dan suspect penyakit) 4) Infografis data data kejadian pada salwa liar dan analisisnya	Sangat Rahasia Biasa Biasa Terbatas Biasa	Eselon I Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV	Tertutup Terbuka Terbuka Terbatas Terbuka	Memiliki dampak yang dapat mengganggu keselamatan bangsa - - Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi -	Dit KKH Dit KKH Dit KKH Dit KKH	
4	KSA.3	PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI						
	KSA.3.0	a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air - Penyusunan/Peremajaan NSPK Pemanfaatan jasa Lingkungan Air - Bimtek pemanfaatan jasa lingkungan air - Penilaian Penetapan areal pemanfaatan air di hutan konservasi - Koordinasi pemanfaatan jasa lingkungan air (masa air dan energi air) - Telaahan teknis proposal IUPA/IUPEA	Biasa Biasa Terbatas Biasa Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV Eselon III	Terbuka Terbuka Terbatas Terbuka Terbatas	- - Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi - Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	PJLHK PJLHK PJLHK PJLHK PJLHK	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
		- Penilaian dalam rangka pengesahan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air/Energi Air	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	PJLHK	
	KSA.3.1	b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam - Penyusunan/Peremajaan NSPK Pemanfaatan jasa Lingkungan wisata alam - Bimtek perusahaan pariwisata alam - Pengesahan Desal Tapak	Biasa Biasa Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon III	Terbuka Terbuka Terbatas	- - Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	PJLHK PJLHK PJLHK	
		- Koordinasi pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam - Telaahan persyaratan administrasi dan teknis usulan IUPSWA	Biasa Terbatas	Eselon IV Eselon III	Terbuka Terbatas	- Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	PJLHK PJLHK	
	KSA.3.2	- Penilaian dalam rangka pengesahan rencana Pengusahaan Pariwisata Alam - Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam a. Tahap Penetapan Prinsip (Peta,Tanda batas,RPPA,Izin lingkungan,izin b. Tahap Izin definitif c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan karbon - Pemohonan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi - Penilaian Proposal Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi - SK Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJPB) - Monitoring Perkembangan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi - Monitoring Pungutan di Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi	Terbatas Biasa Biasa Terbatas Terbatas Biasa Biasa	Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV Eselon IV	Terbatas Terbuka Terbatas Terbatas Terbuka Terbuka	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi - - Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi - Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi - -	PJLHK PJLHK PJLHK PJLHK PJLHK	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Satwa	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI BPFE	
		- Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitas Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Satwa	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI BPFE	
		- Surat Keputusan tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor satwa	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI BPFE	
		- Surat Keputusan tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Satwa	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI BPFE	
		- Surat Keputusan tentang Pembentukan Forum Komunikasi Konservasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI BPFE	
		- Surat Keputusan tentang Penunjukan Tempat-Tempat Terentu Sebagai Kawasan Konservasi Ekosistem Esensial	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI BPFE	
		- Surat Keputusan tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Areal Bermanfaat Konservasi Tinggi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI BPFE	
		- Surat Keputusan tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI BPFE	
		- Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Kajian Kawasan Ekosistem Esensial	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI BPFE	
IV	DAS	PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG						
1	DAS.0	PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI						
	DAS.0.0	a. Pemetaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		1) Supervisi/bimbingan teknis internalisasi/implementasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		2) Penetapan MoU Pengelolaan DAS Lintas Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		3) Review Renstra	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
	DAS.0.1	b. Kompilasi peta klasifikasi DAS dan potensi banjir dan tanah longsor	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		5) Supervisi bimbingan teknis penyusunan baseline data karakteristik DAS	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
	DAS.0.2	c. Ketersediaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		1) Koordinasi multipihak Pengelolaan DAS dalam rangka MoU DAS lintas negara dan internalisasi RPDAST ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		2) Konsolidasi penyusunan MoU DAS lintas negara dan internalisasi RPDAST ke dalam RTRW	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		3) Revitalisasi forum DAS nasional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		4) Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kinerja forum DAS	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		5) Bimbingan teknis/Supervisi kebijakan Pengelolaan DAS	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		1) Fasilitas kegiatan teknik penanggulangan degradasi lahan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		2) Fasilitas dan koordinasi kegiatan transfer teknologi Pengelolaan DAS	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DAS.0.3	d. Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		1) Supervisi/pembinaan MDM	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		2) Supervisi monitoring banjir dan tanah longsor	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		3) Supervisi monitoring dan evaluasi tata air	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		4) Perlemuan teknis evaluasi kinerja Pengelolaan DAS	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		5) Perlemuan teknis monitoring dan evaluasi tata air	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		6) Fasilitas dan implementasi RPDAS dan kinerja DAS	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
		7) Laporan Evaluasi Pengelolaan DAS	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PEPDAS	
2	DAS.1	KONSERVASI TANAH DAN AIR						
	DAS.1.0	a. Pemetaan Konservasi Tanah dan Air	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		1) Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTH RHL DAS) seluruh Indonesia	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		2) Laporan kegiatan penanaman RHL	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		3) Laporan kegiatan strategis bidang RHL	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		4) Usulan kegiatan RHL dari daerah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
	DAS.1.1	b. Reboisasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		1) Laporan tahunan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		2) Laporan tahunan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		3) Laporan pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) tingkat provinsi/kabupaten/kota	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		4) Laporan one map mangrove	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
	DAS.1.2	c. Penghijauan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		1) Laporan tahunan penanaman pohon seluruh Indonesia	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		2) Laporan tahunan hutan rakyat/agroforestry	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		3) Laporan tahunan hutan kota dan penghijauan lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
	DAS.1.3	d. Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		1) Laporan pelaksanaan kegiatan RHL sumber dana Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		2) Laporan pelaksanaan kegiatan bangunan Konservasi Tanah dan Air struktural dan non struktural	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
	DAS.1.4	e. Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		1) Laporan reklamasi dan rencana reklamasi dari (in Pirjam Pakal Kawasan Hutan (IPPKH)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		2) Laporan IPPKH 0 tahunan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		3) SK Penetapan lokasi rehabilitasi DAS	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		4) Laporan pelaksanaan rehabilitasi DAS dan IPPKH	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
		5) Hasil verifikasi lokasi rehabilitasi DAS	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KTA	
3	DAS.2	PERBENIHAN TANAMAN HUTAN						
	DAS.2.0	a. Pemetaan Perbenihan Tanaman Hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		1) Rencana pembangunan perbenihan tanaman hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2) Rencana strategis perbenihan tanaman hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		3) Rencana tahunan perbenihan tanaman hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		4) Rencana kinerja tahunan perbenihan tanaman hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		5) Pembinaan perencanaan pembangunan perbenihan tanaman hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		6) Penyusunan data dasar dan informasi perbenihan tanaman hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
	DAS.2.1	b. Pengembangan Usaha Perbenihan				-		
		1) Fasilitas usaha perbenihan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		2) Pengembangan jejaring kerja	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		3) Pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		4) Peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan fasilitas satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran usaha perbenihan tanaman hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
	DAS.2.2	c. Pengendalian Peredaran Benih				-		
		1) Sertifikasi mutu benih dan bibit	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		2) Tata usaha benih dan bibit	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		3) Penetapan pengada pengedar terdaftar	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		4) Ekspor impor benih dan bibit	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		5) Pengawasan peredaran benih dan bibit	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		6) Data produksi dan distribusi persematan permanen	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
	DAS.2.3	d. Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik				-		
		1) Pembangunan sumber benih bersertifikat	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		2) Pengelolaan, pemanfaatan sumber dan perlindungan sumber benih	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		3) Sertifikasi sumber benih	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		4) Standar sumber benih	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		5) Penetapan benih dari sumber benih bersertifikat	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		6) Identifikasi dan inventarisasi penetapan jenis prioritas	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		7) Penetapan areal sumber daya genetik dan pendaftaran areal sumber daya genetik tanaman hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		8) Penggunaan peta zona benih	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		9) Pembangunan dan Pengelolaan areal sumber daya genetik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		10) Pelaksanaan konservasi sumber daya genetik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
		11) Pemantauan benihvarietas unggul	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PTH	
						-		
4	DAS.3 DAS.3.0	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG a. Pemetaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung				-		
		1) Rancang bangun Pengelolaan hutan lindung	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
		2) Pola Pengelolaan dan rencana Pengelolaan kesatuan Pengelolaan hutan lindung	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
		3) Rencanan Pengelolaan hutan lindung jangka pendek	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
		4) Rencanan Pengelolaan hutan lindung jangka panjang	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
		5) Laporan tahunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) model dan hutan lindung	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
	DAS.3.1	b. Pemetaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung				-		
		1) Penataan areal kerja hutan lindung	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	

Page 27

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2) Zonasi dan/atau blocking areal kerja hutan lindung	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
	DAS.3.2	3) Rekonstruksi batas kesatuan Pengelolaan hutan lindung	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
		c. Bina Kelembagaan				-		
		1) Identifikasi kebutuhan kelembagaan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
		2) Fasilitas pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan personil kesatuan Pengelolaan hutan lindung	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
	DAS.3.3	d. Pemanfaatan Hutan Lindung				-		
		1) Pemanfaatan kawasan hutan lindung	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
		2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kesatuan Pengelolaan hutan lindung	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
		3) Pemanfaatan jasa lingkungan pada kesatuan Pengelolaan hutan lindung	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
		4) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan Pengelolaan hutan lindung	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHL	
5	DAS.4 DAS.4.0	PENGENDALIAN KERUSAKAN PERAIRAN DARAT a. Pemetaan Pengelolaan Kerusakan Perairan Darat				-		
		1) Perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKPD	
		2) Laporan basis data perairan darat	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKPD	
		3) Laporan hasil Supervisi atas pelaksanaan kegiatan di daerah bidang fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKPD	
	DAS.4.1	b. Pengendalian Kerusakan Sungai				-		
		1) Pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKPD	
		2) Laporan Supervisi pelaksanaan di daerah bidang pengendalian kerusakan sungai	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKPD	
	DAS.4.2	c. Pengendalian Kerusakan Danau				-		
		1) Pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKPD	
		2) Laporan Supervisi pelaksanaan di daerah bidang pengendalian kerusakan danau	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKPD	
		3) Laporan profil 13 danau prioritas	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKPD	
	DAS.4.3	d. Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah				-		
		1) pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKPD	
		2) Laporan Supervisi pelaksanaan di daerah bidang pengendalian kerusakan mata air dan air tanah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKPD	
		3) Laporan sosialisasi dan internalisasi kerusakan mata air dan air tanah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKPD	
V	HPL	PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI						
1	HPL.0 HPL.0.0	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI a. Pemetaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi				-		
		1) Permohonan Working Area (WA)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHP	
		2) Penetapan peta indikatif	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI KPHP	

Page 28

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	HPL 3.1	b. Pengendalian Bahan Baku dan Produk Industri Primer Hasil Hutan 1) Laporan rencana pemenuhan bahan baku industri 2) Laporan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online 3) Bimbingan teknis pemenuhan bahan baku 4) Monitor dan evaluasi pemenuhan bahan baku	Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka	- -	DI PPH DI PPH	
	HPL 3.2	c. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan 1) Permohonan sertifikasi legalitas kayu 2) Penilaian legalitas kayu 3) Perpanjangan sertifikasi legalitas kayu	Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka	- - -	DI PPH DI PPH DI PPH	
	HPL 3.3	d. Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan 1) Notifikasi ekspor produk industri hasil hutan 2) Notifikasi impor produk industri hasil hutan	Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka	- -	DI PPH DI PPH	
6		INDUSTRI a. Industri Kayu HPHHTI/IUPHHK b. Industri Kayu Non HPHHTI/IUPHHK c. Industri Non Kayu	Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka	- - -	DI PPH DI PPH DI PPH	
7	HPL 4 HPL 4.0	URAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN a. Penerimaan Negara Bukan Pajak Dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak 1) Data terkait putang PNBP 2) Data atas denda Pelanggaran oleh Unit Manajemen (DPEH) 3) Data Pemasalahan yang masih dalam proses PTUN 4) Data luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) 5) Data PNT	Rahasta Rahasta Rahasta Rahasta	Eselon II Eselon II Eselon II Eselon II	Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI IPHH DI IPHH DI IPHH DI IPHH	

Page 31

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	HPL 4.1	b. Peredaran Hasil Hutan Dokumen peredaran hasil hutan 1) Data User-ID 2) Dokumen SIPUHH 3) Data Produksi KB Lingkup Nasional, Propinsi, Kabupaten 4) Data Angkutan KB Lingkup Nasional, Propinsi, Kabupaten	Rahasta Terbatas Biasa Biasa	Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon IV	Tertutup Terbatas Terbuka Terbuka	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi -	DI IPHH DI IPHH DI IPHH DI IPHH	
	HPL 4.2	c. Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan 1) Permohonan Pengawas Tenaga Teknis (Wasgantis) dan Tenaga Teknis (Gantis) 2) Pelatihan Pengawas Tenaga Teknis (Wasgantis) dan Tenaga Teknis (Gantis) 3) Perpanjangan Pengawas Tenaga Teknis (Wasgantis) dan Tenaga Teknis (Gantis) 4) Penerbitan Sertifikat Tenaga Teknis (Wasgantis) dan Tenaga Teknis (Gantis)	Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	- - - -	DI IPHH DI IPHH DI IPHH DI IPHH	
	HPL 4.3	d. Tertib Peredaran Hasil Hutan Dokumen penerbitan peredaran hasil hutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI IPHH	
8		IZIN USAHA PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHKK) HAHT/RE a. Data Areal IUPHKK HAHT/RE termasuk sertifikat hasil hutan b. IUK IUPHKK HAHT/RE c. Kerjasama d. Pembatalan/Penetapan	Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	- - - -	DI IPHH DI IPHH DI IPHH DI IPHH	
9		MODAL DAN PERALATAN a. Investasi industri b. Peralatan c. Tenaga Kerja d. Pemegang Saham e. Neraca Perusahaan	Biasa Biasa Biasa Rahasta Rahasta	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon II Eselon II	Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup	- - - Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI IPHH DI IPHH DI IPHH DI IPHH DI IPHH	

Page 32

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
10		PRODUKSI a. Target Produksi RKT dan Bagas Kerja b. Produksi Kayu c. Produksi Non Kayu	Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka	- - -	DI IPHH DI IPHH DI IPHH	
11		PELANGGARAN DAN SANKSI a. Pemblokiran b. Denda c. Pencabutan Areal HPH/HTU/UPHHK	Rahasta Rahasta Rahasta	Eselon II Eselon II Eselon II	Tertutup Tertutup Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI IPHH DI IPHH DI IPHH	
VI	PKL	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN						
1	PKL.0 PKL.0.0	PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT a. Inventarisasi dan Penetapan - Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional - Data Ekosistem Gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya PKL.0.1 b. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut - Rancangan Perindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional, Provinsi dan Kabupaten - Laporan Evaluasi Rencana Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut PKL.0.2 c. Pelestarian Ekosistem Gambut - Data pemantauan status kualitas lahan gambut - Data Lahan gambut yang rusak dan yang terpulihkan	Biasa Biasa Rahasta Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon II Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Tertutup Terbuka Terbuka	- - Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara - -	DI PKG DI PKG DI PKG DI PKG DI PKG	Kecuali Peta Format SHP tertutup
2	PKL.1 PKL.1.0	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESIR DAN LAUT a. Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut - Rencana Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pesisir dan laut	Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka	- -	DI PPKPL DI PPKPL	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		- Rancangan Peraturan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut - Design Engineering & Development (DED) IPAL - Kerjasama dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut - Pengembangan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut PKL.1.1 b. Inventarisasi dan Status Mutu - Baseline data dan pemutakhiran data sumber pencemar, volume beban pencemar dan tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut - Data kualitas lingkungan pesisir dan laut - Data Ekosistem Pesisir - Status mutu air laut - Juknis Pemantauan Kualitas Air Laut - Juklak Pemantauan Kualitas Air Laut - Data sumber pencemar pesisir dan laut PKL.1.2 c. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan - Ijin pembuangan limbah cair dan dumping ke laut - Data IPAL di perkampungan nelayan - Data Kawasan yang dipulihkan ekosistem pesisir - Dokumen yang merangkul pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut - Data sumber pencemar industri dan domestik	Terbatas Biasa Terbatas Biasa Terbatas Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Terbatas Biasa Biasa Biasa	Eselon III Eselon IV Eselon III Eselon IV Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbatas Terbuka Terbatas Terbuka Terbatas Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbatas Terbuka Terbuka Terbuka	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi - Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi - Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi - - - - - - - Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi - - - -	DI PPKPL DI PPKPL DI PPKPL	
3	PKL.2 PKL.2.0	PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR a. Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air - Dokumen rencana kerja pengendalian pencemaran air - Dokumen kerjasama dalam rangka mendukung pengendalian pencemaran air dan penurunan beban pencemaran air PKL.2.1 b. Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran - Data Pemantauan DAS Prioritas - Daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban pencemaran - Status mutu air dan indeks kualitas air	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	- - - - - -	DI PPA DI PPA DI PPA DI PPA DI PPA DI PPA	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	PKL 2.2	c. Pengendalian Pencemaran Industri - Laporan evaluasi kinerja industri	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	DI PPA	
	PKL 2.3	d. Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik - Laporan evaluasi kinerja pengendalian pencemaran air dari kegiatan prasarana dan jasa - Data penurunan beban pencemaran air limbah dari kegiatan prasarana dan jasa - Data IPAL Domestik - Data penurunan beban pencemaran air limbah dan meningkatnya kualitas air	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PPA	
	PKL 2.4	e. Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi - Data IPAL Usaha Skala Kecil	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PPA	
4	PKL 3	PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA						
	PKL 3.0	a. Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara - Dokumen perencanaan pengendalian pencemaran udara - Dokumen kerjasama pengendalian pencemaran udara - Buku Mutu Pengendalian Pencemaran Udara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PPU	
	PKL 3.1	b. Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara - Data Indeks Kualitas Udara Nasional - Profil Indeks Kualitas Udara Nasional - Inventarisasi Emisi dan perhitungan beban emisi - Status Mutu Udara - Wilayah Pengelolaan kualitas udara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PPU	
	PKL 3.2	c. Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak - Laporan Kinerja Perusahaan - Penerapan teknologi Emisi, pengujian emisi kendaraan - Kualitas udara perkotaan - Jalan Kriteria Green Transportator	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PPU	
	PKL 3.3	d. Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak - Pelaporan Pemantauan Emisi Industri	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	DI PPU	
	PKL 3.4	e. Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi - Data pemantauan udara (AQMS)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PPU	
5	PKL 4	PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA						
	PKL 4.0	a. Perencanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka - Tata kelola pemulihan lahan akses Terbuka	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKLAT	

Page 33

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	PKL 4.1	- Evaluasi pelaksanaan pemulihan lahan akses Terbuka - Kriteria Kerusakan Lahan Akses Terbuka akibat kegiatan tambang rakyat b. Inventarisasi dan Pelembagaan - Profil tambang rakyat - Peta Lahan Akses Terbuka	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKLAT	
	PKL 4.2	c. Pemulihan Kerusakan - Profil Pengelolaan tutupan lahan Provinsi - Design Engineering & Development (DED) Pemulihan Lahan Akses Terbuka	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKLAT	Kecuali Peta Format SHP Tertutup
VII	PLB	PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA						
1	PLB.0	PENGELOLAAN SAMPAH						
	PLB.0.0	a. Barang dan Kemasan - Dokumen Peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah sektor manufaktur - Dokumen Peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sektor Ritel - Dokumen Peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Sektor Jasa Makanan / Minuman - Dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PS	Kecuali Peta Format SHP Tertutup
		- Sistem Informasi Pengurangan Sampah oleh Produsen - Dokumen FGD	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PS	Kecuali Peta Format SHP Tertutup
		- Dokumen Penyusunan Peraturan Menteri pengurangan kantong belanja plastik	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PS	Kecuali Peta Format SHP Tertutup
	PLB.0.1	b. Sampah Spesifik dan Daur Ulang - Profil Bank Sampah - Kajian Timbulan Sampah yang mengandung B3 - Rancangan Peraturan Menteri dalam pembentukan desa mandiri dalam pengelolaan sampah - Dokumen Penyusunan RPP Sampah Spesifik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PS	
			Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PS	
			Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PS	
			Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PS	

Page 30

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	PLB.0.2	c. Sarana dan Prasarana						
		- Dokumen Transportasi Mekanisasi (Mesin Penggiling Sampah Plastik)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- Dokumen Penelitian Pendahuluan Pusat Listrik Tenaga Berbasis Sampah (PLTsa)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- Dokumen Design and Detail (DED) gambar konstruksi bangunan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- Dokumen Review Data Profil Daerah dalam Pengelolaan Sampah pada	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
	PLB.0.3	d. Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah						
		- Dokumen Pembinaan Kinerja Pengelolaan Sampah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Dokumen Penghargaan Lingkungan (ADIPURA)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Dokumen Verifikasi Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- Dokumen Monitoring Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- Dokumen Evaluasi Kinerja Pengelolaan Sampah	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
2	PLB.1	PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN						
	PLB.1.0	a. Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya Beracun						
		- Dokumen Penyusunan Remstra Direktorat B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Dokumen Penyusunan Permen Penetapan Kategori B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Dokumen Roadmap Penerapan Konvensi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Dokumen Pelaksanaan Konvensi B3 dan Kerja Sama Luar Negeri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Dokumen Pemutakhiran Naskah Akademis Pengesahan Konvensi B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- SOP Pengawasan di Pusat dan Daerah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Dokumen Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi B3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- Dokumen Kerjasama Antar Negara	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- Bahan Dialog Publik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	PLB.1.1	b. Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun						
		- Dokumen Kebijakan Tata Kelola B3 (Impor, Peredaran dan Pengawasan)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Dokumen Registrasi, Rekomendasi, Notifikasi dan Perizinan B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Dokumen Penyusunan Final Permen Registrasi dan Notifikasi B3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- Profil Importir/Eksportir B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
	PLB.1.2	c. Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya Beracun (B3)						
		- Dokumen Penyusunan Pedoman Teknis Inventarisasi B3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- Rumusan Kebijakan Inventarisasi B3 diberbagai Sektor	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- Kajian Teknis B3 dan POPs	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Base Line Peredaran dan Penggunaan B3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
	PLB.1.3	d. Penanganan Bahan Berbahaya Beracun						
		- Laporan Evaluasi Pembatasan dan Penghapusan B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Laporan Bimbingan Teknis Pembatasan dan Penghapusan B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Roadmap Pengurangan dan Penghapusan B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Dokumen Kegiatan Asia Pasifik Penghapusan Merkuri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- Dokumen Kegiatan Teknis dan Analisis Kategori B3	Terbatas	Eselon III	Terbuka	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- Peta Sebaran Bahan Tambang Merkuri (Batu Ginabar)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	Kecuali Peta Format SHP Tertutup
		- Dokumen Pemusnahan B3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- Dokumen Penyusunan Pedoman Teknis Penghapusan B3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	
		- NIP Pengurangan dan Penghapusan B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PB	
		- International/Regional Consultation tentang Pengurangan dan Penghapusan B3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PB	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		- Dokumen teknis Indeks kinerja PLB3 dan LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen Penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Dirjen tentang NSPK PKPLB3 & LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen Penyusunan Peraturan Dirjen tentang Pelaporan PLB3 & LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen pemantauan kinerja PLB3 Agroindustri (Berita Acara, tindak lanjut)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Laporan kinerja PLB3 & LNB3 yang disampaikan perusahaan Manufaktur	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen kinerja PLB3 & LNB3 perusahaan Manufaktur	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- SOP pemantauan kinerja PLB3 & LNB3 Manufaktur	Biasa	Eselon IV	Tertuka	-	DI PKPLB3	
		- SOP Alur pelaporan data PLB3 & LNB3 Manufaktur	Biasa	Eselon IV	Tertuka	-	DI PKPLB3	
		- Laporan data dan informasi PLB3 & LNB3 sektor Manufaktur	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen pedoman teknis PLB3 & LNB3 Manufaktur	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemda	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan perusahaan/asosiasi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan perguruan tinggi/pihak lainnya	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		- Dokumen bahan bimtek dan supervisi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Laporan hasil bimbingan teknis	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Laporan hasil supervisi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen evaluasi bimbingan teknis dan supervisi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
	PLB 2.2	c. Sektor Agroindustri						
		- Dokumen Penyusunan Renstra PKPLB3 & LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen Teknis Kebijakan PKPLB3 & LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen Penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Dirjen tentang PKPLB3 & LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen teknis Indeks kinerja PLB3 dan LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen Penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Dirjen tentang NSPK PKPLB3 & LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen Penyusunan Peraturan Dirjen tentang Pelaporan PLB3 & LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen pemantauan kinerja PLB3 Agroindustri (Berita Acara, tindak lanjut)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Laporan kinerja PLB3 & LNB3 yang disampaikan perusahaan Agroindustri	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		- Dokumen kinerja PLB3 & LNB3 perusahaan Agroindustri	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- SOP pemantauan kinerja PLB3 & LNB3 Agroindustri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-		
		- SOP alur pelaporan data PLB3 & LNB3 Agroindustri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-		
		- Laporan data dan informasi PLB3 & LNB3 sektor Agroindustri	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen pedoman teknis PLB3 & LNB3 agroindustri	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan perusahaan/asosiasi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan perguruan tinggi/pihak lainnya	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen bahan bimtek dan supervisi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Laporan hasil bimbingan teknis	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKPLB3	
		- Laporan hasil supervisi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen evaluasi bimbingan teknis dan supervisi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
	PLB.2.3	d. Sektor Prasarana dan Jasa						
		- Dokumen Penyusunan Renstra PKPLB3 & LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen Teknis Kebijakan PKPLB3 & LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	

Page 43

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		- Dokumen Penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Dirjen tentang PKPLB3 & LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen teknis Indeks kinerja PLB3 dan LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen Penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Dirjen tentang NSPK PKPLB3 & LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen Penyusunan Peraturan Dirjen tentang Pelaporan PLB3 & LNB3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen pemantauan kinerja PLB3 Prasarana dan Jasa (Berita Acara, tindak lanjut)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Laporan kinerja PLB3 & LNB3 yang disampaikan perusahaan Prasarana dan Jasa	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen kinerja PLB3 & LNB3 perusahaan Prasarana dan Jasa	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- SOP pemantauan kinerja PLB3 & LNB3 Agroindustri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-		
		- SOP Alur pelaporan data PLB3 & LNB3 Agroindustri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-		
		- Laporan data dan informasi PLB3 & LNB3 sektor Prasarana dan Jasa	Terbatas	Eselon III	Terbuka	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen pedoman teknis PLB3 & LNB3 Prasarana dan Jasa	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	
		- Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan perusahaan/asosiasi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3	

Page 44

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan perguruan tinggi/pihak lainnya - Dokumen bahan bimtek dan supervisi - Laporan hasil bimbingan teknis - Laporan hasil supervisi - Dokumen evaluasi bimbingan teknis dan supervisi 	Terbatas Terbatas Biasa Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon IV Eselon III Eselon III	Terbatas Terbatas Terbuka Terbatas Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKPLB3 DI PKPLB3 DI PKPLB3 DI PKPLB3 DI PKPLB3	
4	PLB.3 PLB.3.0 PLB.3.1 PLB.3.2	VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 a. Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Beracun - Dokumen Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri tentang Izin Pengumpulan Limbah B3 - Dokumen Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri tentang Pemanfaatan Limbah B3 - Dokumen hasil kegiatan Bimbingan Teknis / Workshop - Kesepakatan Keselamatan dengan pihak lain b. Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) - Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 - Dokumen Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 - SK Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 c. Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) - Dokumen Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri tentang Izin Penimbunan Limbah B3	Terbatas Terbatas Biasa Biasa Biasa Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon III Eselon III	Terbatas Terbatas Terbuka Terbuka Terbuka Terbatas Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi - - - Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI VPLB3 DI VPLB3 DI VPLB3 DI VPLB3 DI VPLB3 DI VPLB3 DI VPLB3	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	PLB.3.3	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri tentang Izin Dumping Limbah B3 berupa <i>Synthetic Based Mud</i> dan <i>Water Based Mud</i> d. Penetapan dan Notifikasi Limbah B3 dan Limbah Non B3 - Dokumen Penyusunan Rancangan Surat Keputusan Menteri tentang Penetapan Limbah B3 dan Limbah Non B3 - Dokumen Penyusunan Rancangan Surat Keputusan Menteri tentang Pengecualian Limbah B3 dan Limbah Non B3 - Surat Dijen PSLB3 perihal Klarifikasi Limbah B3 dan Limbah Non B3 - Dokumen Penyusunan Rancangan Surat Dijen PSLB3 Hal Notifikasi ekspor Limbah B3 sesuai negara tujuan - SK Tim Penetapan Limbah B3 - Dokumen Penyusunan Rancangan rekomendasi/persetujuan ekspor Limbah B3 - Dokumen Penyusunan Rancangan Rekomendasi tentang Import Limbah Non B3 - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI VPLB3 DI VPLB3 DI VPLB3 DI VPLB3 DI VPLB3 DI VPLB3 DI VPLB3 DI VPLB3 DI VPLB3	
5	PLB.4 PLB.4.0	PEMULIHAN KONTAMINASI DAN TANGGAP DARURAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN a. Pemulihan Sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas - Dokumen rencana pemulihan sektor pertambangan, energi, minyak dan gas	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		- Dokumen berita acara rencana pemulihan sektor pertambangan, energi, minyak dan gas	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Dokumen berita acara pemulihan sektor sektor pertambangan, energi, minyak dan gas	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Surat Keterangan Tidak Ada Lahan Terkontaminasi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- SOP Pemulihan Sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKTDLB3	
		- Dokumen Penyusunan Renstra Final Pemulihan Sektor pertambangan, energi, minyak dan gas	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Surat keterangan tidak perlu dipulihkan sektor pertambangan energi, minyak dan gas	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
	PLB.4.1	b Pemulihan Sektor Manufaktur, Agroindustri, dan Jasa						
		- Dokumen rencana pemulihan sektor manufaktur, agroindustri dan jasa	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Dokumen berita acara rencana pemulihan sektor Manufaktur, agroindustri dan jasa	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Dokumen berita acara pemulihan sektor Manufaktur, agroindustri dan jasa	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	

Page 47

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		- Surat keterangan tidak ada Lahan Terkontaminasi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Surat status penyelesaian Lahan Terkontaminasi limbah B3	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- SOP Inventarisasi dan identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKTDLB3	
		- SOP Pemulihan Sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKTDLB3	
		- Renstra Final Pemulihan sektor Manufaktur, Agroindustri dan jasa	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Peta Inventarisasi Lahan Terkontaminasi limbah B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKTDLB3	Kecuali Peta Format SHP Tertutup
	PLB.4.2	c Tanggap Darurat dan Pemulihan Sektor Non Institusi						
		- Dokumen rencana pemulihan sektor Non Institusi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Dokumen berita acara rencana pemulihan sektor Non Institusi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Dokumen berita acara pemulihan sektor Non Institusi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- Renstra Final Pemulihan sektor Tanggap darurat dan non institusi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
		- SOP Penanganan Tanggap Darurat Limbah B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKTDLB3	
		- SOP Pemulihan Sektor non Institusi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKTDLB3	
		- Dokumen Laporan Pelaksanaan Tanggap Darurat	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKTDLB3	
		- Dokumen laporan penyempalan sistem tanggap darurat di provinsi dan unit usaha dan/atau kegiatan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKTDLB3	
		Dokumen Surat Keterangan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI PKTDLB3	
		- Surat Keputusan Pengguna Anggaran	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas fungsi Organisasi	DI PKTDLB3	
VIII	PPI	PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM						
1	PPI.0	ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM						
	PPI.0.0	a. Identifikasi dan Analisis Kerentanan						

Page 48

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPI.0.1 PPI.0.2 PPI.0.3	- Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Ekologis dan Buatan - Laporan Hasil Pengembangan Indikator Kerentanan Sektor dan Pemutakhiran Data Kerentanan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI API	
		b. Perencanaan Adaptasi - Dokumen Administrasi Penyusunan Pedoman Rencana Adaptasi Perubahan Iklim	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI API	
		c. Adaptasi Ekologi Alami - Dokumen Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem Darat : Kawasan Non Budidaya, Kawasan Hutan dan Lahan, Ekosistem Air Tawar - Dokumen Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem Pesisir dan Laut : Pengelolaan Pesisir dan Laut, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan mutu Laut, Penyediaan Acuan Penerapan Daya Dukung Lingkungan pulau-pulau kecil	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI API	
		d. Adaptasi Ekologi Buatan - Dokumen Program Kampung Iklim (ProKlim) : Perkotaan dan Pedesaan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat API	
		- Laporan Hasil Pengembangan Perangkat untuk Mendukung Pelaksanaan ProKlim	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat API	
		2	PPI.1 PPI.1.0 PPI.1.1 PPI.1.2 PPI.1.3	MITIGASI PERUBAHAN IKLIM a. Perencanaan Mitigasi Perubahan Iklim - Dokumen Perencanaan Sektor Kehutanan, Limbah, Energi, dan Limbah yang terkait dengan capaian penurunan emisi GRK sekitar 29% (APBN) dan 41% (BLN) di tahun 2030 b. Penyusunan Perangkat Mitigasi Perubahan Iklim c. Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi - Laporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan limbah - Laporan pemutakhiran data dan informasi aksi mitigasi bidang kehutanan - Dokumen hasil pemantauan pelaksanaan mitigasi Perubahan Iklim tingkat Provinsi d. REDD+ - Fasilitas Penyusunan Sistem Registri Mitigasi Perubahan Iklim (REDD+) - Fasilitas Penyusunan Sistem Informasi Safe Guard (SIG REDD+) e. Pengendalian Bahan Perusak Ozon (BPO) - Pembatasan Alokasi Konsumsi BPO meliputi : evaluasi, realisasi impor dan pelaporan nasional impor BPO - Penerbitan Surat Rekomendasi Impor BPO	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-
Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim				
Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim				
Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim				
Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim				
Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PPI.2 PPI.2.0 PPI.2.1 PPI.2.2	- Data base rekomendasi impor BPO	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	
		- Dokumen Penetapan Alokasi Impor BPO untuk Perusahaan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	
		- Dokumen Evaluasi, realisasi dan pelaporan Konsumsi BPO ke Sekretariat Ozon dan Multilateral Fund	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	
		- Dokumen Penurunan BPO Inklusif nasional dan internasional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	
		- Fasilitas penanganan isu strategis penurunan BPO termasuk koordinasi dengan KL terkait dalam pengendalian konsumsi BPO	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	
		- Laporan pemantauan penggunaan refrigeran untuk servis dan user	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	
		- Pelaksanaan alih teknologi pada sektor AC, refrigerasi dan Foam termasuk pengujian proposal ke Multilateral Fund sampai ke tahap pemberian hibah ke perusahaan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	
		a. Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan - Pembuatan database emisi - Pengumpulan data/informasi dari daerah/sektor terkait (walidata), Dokumen hasil rapat pembahasan pengumpulan data, Dokumen hasil validasi dengan dari daerah/sektor terkait (walidata).	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI. Inventarisasi GRK	
		- Dokumen Verifikasi Perhitungan Inventarisasi Gas Rumah Kaca - Laporan inventarisasi gas rumah kaca nasional (informasi emisi dan serapan gas rumah kaca) sektor kehutanan - Laporan inventarisasi gas rumah kaca nasional (informasi emisi dan serapan gas rumah kaca) sektor pertanian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI. Inventarisasi GRK	
		b. Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan - Pengumpulan data/informasi dari daerah/sektor terkait (walidata), Dokumen hasil rapat pembahasan pengumpulan data, Dokumen hasil validasi dengan dari daerah/sektor terkait (walidata), Dokumen Verifikasi Perhitungan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca - Laporan inventarisasi gas rumah kaca nasional (informasi emisi dan serapan gas rumah kaca) sektor energi - Laporan inventarisasi gas rumah kaca nasional (informasi emisi dan serapan gas rumah kaca) sektor industri - Laporan inventarisasi gas rumah kaca nasional (informasi emisi dan serapan gas rumah kaca) sektor limbah Dokumen BUR (Biennial Update Report)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI. Inventarisasi GRK	
c. Monitoring pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis - Dokumen Pengembangan sistem verifikasi capaian aksi mitigasi Sektor Kehutanan (Dokumen FREL/Forest Reference Emission Level)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	DI. Inventarisasi GRK			

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
	PPI.2.3	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pengembangan sistem verifikasi capaian aksi mitigasi Sektor Pertanian Dokumen pembangunan sistem registri aksi mitigasi sektor kehutanan Dokumen pembangunan sistem registri aksi mitigasi sektor pertanian <p>d. Monitoring petaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pengembangan sistem verifikasi capaian aksi mitigasi sektor energi Dokumen pembangunan sistem verifikasi capaian aksi mitigasi sektor industri Dokumen pembangunan sistem verifikasi capaian aksi mitigasi sektor limbah Dokumen Pengembangan sistem registri aksi mitigasi sektor energi Dokumen pembangunan sistem registri aksi mitigasi sektor industri Dokumen pembangunan sistem registri aksi mitigasi sektor limbah Dokumen Nasional Communicator (NATCOM) 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Di. Inventarisasi GRK	
	PPI.3	MOBILISASI SUMBERDAYA SEKTORAL DAN REGIONAL						
	PPI.3.0	<p>a. Sumberdaya Pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Draft aturan Perundangan terkait dengan Mekanisme Pembiayaan milik nasional Updating Pemetaan Pendanaan Perubahan Iklim Dokumen administrasi penyusunan Pedoman Mekanisme Benefit Sharing Dokumen administrasi penyusunan model mekanisme Pengembangan manfaat dan penanganan deforestasi dan degradasi hutan Model Mekanisme Pengembangan manfaat dan penanganan deforestasi dan degradasi hutan Dokumen Clean Development Mechanism (CDM) 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Di. Mobilisasi	
	PPI.3.1	<p>b. Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah karbon</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Roadmap Peningkatan kapasitas perubahan iklim Dokumen Pengembangan sistem Informasi database mengenai kapasitas sains perubahan iklim dan Teknologi Rendah Karbon Dokumen administrasi penyusunan mekanisme alih teknologi rendah karbon Mekanisme alih teknologi rendah karbon Dokumen administrasi penyusunan kriteria teknis untuk mendapatkan rekomendasi teknis dibidang limbah dan energi Kriteria teknis untuk mendapatkan rekomendasi teknis dibidang limbah dan energi 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Di. Mobilisasi	
	PPI.3.2	<p>c. Fasilitas Perundingan Perubahan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas perundingan perubahan iklim UNFCCC : Laporan DELRI COP 21 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Di. Mobilisasi	

Page 31

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas penundingan perubahan iklim Non UNFCCC - Report The 21 Meeting of Asean Regional Knowledge Network On Forest and Climate Change (ARKN-FCC) 						
5	PPI.4	PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN						
	PPI.4.0	<p>a. Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perencanaan (Program dan Evaluasi) Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Nasional 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Di. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	
	PPI.4.1	<p>b. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen keteknikal pencegahan kebakaran hutan dan lahan (patrol pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, persiapan lahan tanpa bakar, kesiapstagaan dan pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan) Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan (bahan cetak dan bahan audio visual) 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Di. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	
	PPI.4.2	<p>c. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen peringatan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan Dokumen pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran Data lokasi kebakaran hutan dan lahan Data sebaran luas kebakaran hutan dan lahan 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Di. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	
	PPI.4.3	<p>d. Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Sistem kemitraan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Dokumen Uji Kepatuhan Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Daikarhulia) Dokumen Masyarakat Peduli Api 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Di. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	
	PPI.4.4	<p>e. Tenaga dan Sarana Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Tenaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Daikarhulia) Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Daikarhulia) Dokumen kegiatan brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Daikarhulia) 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Di. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	

Page 32

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhula)	Biasa	Eselon IV	Tertutup	-	DI	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
IX PSL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN								
1	PSL.0	PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL						
	PSL.0.0	a. Pemetaan dan Perpetaan						
		1) Inventarisasi dan informasi spasial dan perpetaan kawasan hutan kemasyarakatan	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKPS
		2) Inventarisasi dan informasi spasial dan perpetaan kawasan hutan desa	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKPS
		3) Inventarisasi dan informasi spasial dan perpetaan kawasan hutan tanaman rakyat	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKPS
		4) Kemitraan masyarakat dengan pemegang Izin pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKPS
	PSL.0.1	b. Penyilapan Hutan Kemasyarakatan						
		1) Peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan Kemasyarakatan	Biasa	Eselon IV	Tertutup	-	DI	PKPS
		2) Verifikasi areal kerja hutan kemasyarakatan	Biasa	Eselon IV	Tertutup	-	DI	PKPS
	PSL.0.2	c. Penyilapan Hutan Desa						
		1) Peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan desa	Biasa	Eselon IV	Tertutup	-	DI	PKPS
		2) Verifikasi areal kerja hutan desa	Biasa	Eselon IV	Tertutup	-	DI	PKPS
	PSL.0.3	d. Penyilapan Hutan Tanaman Rakyat						
		1) Peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan Tanaman Rakyat	Biasa	Eselon IV	Tertutup	-	DI	PKPS
		2) Verifikasi areal kerja hutan tanaman rakyat	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKPS
	PSL.0.4	e. Penyilapan Kemitraan						
		Nasabah dinas yang berkenaan dengan perencanaan dan pengendalian	Biasa	Eselon IV	Tertutup	-	DI	PKPS
		1) Peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKPS
		2) Verifikasi areal kerja penyilapan kemitraan masyarakat dengan pemegang Izn pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan dan Pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan Pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan BUMN						

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PSL.1	PENANGANAN KONFLIK, TENURIAL, DAN HUTAN						
	PSL.1.0	a. Pemetaan Konflik, Tipologi jenis dan sumber penumusan metodologi penanganan konflik Pengelolaan hutan.	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKTHA
	PSL.1.1	b. Penanganan Konflik						
		1) Negosiasi dan mediasi	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKTHA
		2) Advokasi dan pendampingan masyarakat yang berkaitan penanganan konflik Pengelolaan hutan	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKTHA
	PSL.1.2	c. Penanganan Tenurial						
		1) Penanganan klaim antar lembaga usaha	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKTHA
		2) Penanganan klaim antar pemerintah	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKTHA
		3) Penanganan klaim antar pemerintah daerah dengan pemerintah	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKTHA
		4) Penanganan klaim antara masyarakat dengan lembaga usaha	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKTHA
		5) Penanganan klaim antara masyarakat dengan pemerintah daerah	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKTHA
		6) Penanganan klaim antara masyarakat dengan pemerintah	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	DI	PKTHA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	GKM.0.1 GKM.0.2	b. Pengawasan Penataan Berkas yang berkaitan dengan Pengawasan penataan pelaksanaan perjanjian dan peraturan perundang-undangan 1 Penerapan Sanksi Administrasi Berkas yang berkaitan dengan penerapan sanksi administrasi 2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi 3 Pencabutan sanksi administrasi sumber daya alam, industri, prasarana jasa lingkungan hidup dan kehutanan	Rahasia Rahasia Rahasia Biasa	Eselon II Eselon II Eselon II Eselon IV	Tertutup Tertutup Tertutup Terbuka	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara -	Dit PPSA Dit PPSA Dit PPSA Dit PPSA	
2	GKM.1 GKM.1.0 GKM.1.1 GKM.1.2	PENYELESAIAN SENGKETA a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam Berkas yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan bidang Sumber Daya Alam b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa Berkas yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan bidang Industri, Prasarana dan Jasa c. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Berkas yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sektor Sumber Daya Alam, Industri, Prasarana dan Jasa	Rahasia Rahasia Rahasia	Eselon II Eselon II Eselon II	Tertutup Tertutup Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Dit PSLH Dit PSLH Dit PSLH	
3	GKM.2	PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN Berkas yang berkaitan dengan pencegahan, penyelidikan, dan pengamanan hutan :						

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		a. Pelanggaran b. Bencana alam c. Kebakaran hutan d. Sengketa hutan e. Tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi f. Hama penyakit g. Polisi kehutanan	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	Dit PPH Dit PPH Dit PPH Dit PPH Dit PPH Dit PPH	
4	GKM.3	PENEGAKAN HUKUM PIDANA Berkas yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana : a. Kerusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan b. Perambahan hutan c. Pencemaran lingkungan hidup	Rahasia Rahasia Rahasia	Eselon II Eselon II Eselon II	Tertutup Tertutup Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Dit PHP Dit PHP Dit PHP	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		d. Pembalikan lar dan kejahatan keanekaragaman hayati	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Dit PHP	
		e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Dit PHP	
XI	SDM	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
1	SDM.0 SDM.0.0	PENYULUHAN a. Pengembangan Penyuluhan - Program Kerja Penyuluhan - Materi Penyuluhan - Program Penyuluhan - Sarana dan Prasarana Penyuluhan - Publikasi Penyuluhan - Evaluasi dan Pelaporan SDM.0.1 b. Ketenagaan Penyuluhan - Pengembangan Tenaga Penyuluhan - Pembinaan Penyuluh PNS - Pembinaan Penyuluh Non Aparatur SDM.0.2 c. Kelembagaan Penyuluhan - Pemberdayaan Masyarakat - Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	- - - - - - - - - - - -	Pusat Penyuluhan BP2SDM	
2	SDM.1 SDM.1.0	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA a. Perencanaan dan Pengembangan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan SDM LHK Aparatur - Pengembangan Budaya Kerja - Pembinaan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) - Pembentukan Penyuluh Lingkungan Hidup - Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pengembangan SDM LHK Daerah SDM.1.1 b. Perencanaan dan Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan SDM LHK Aparatur - Penyelenggaraan Bakti Rimbawan - Penyelenggaraan Job Fair SDM.1.2 c. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan - Penyusunan Standar SDM LHK - Pengujian Kompetensi SDM LHK	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	- - - - - - - - - - - -	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	

Page 59

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	SDM.2 SDM.2.0	PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN a. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Berkas yang berkaitan dengan penyelenggaraan: - Pelatihan masyarakat - Pelatihan pelajar, mahasiswa dan TOT untuk guru - Penyusunan bahan ajar kurikulum dan silabus SDM.2.1 b. Penyelenggaraan Ekspose Generasi Lingkungan Berkas yang berkaitan dengan penyelenggaraan: - Pelatihan kader lingkungan hidup - Pameran dan ekspose - Penyusunan bahan ajar untuk widyaiswara, narasumber SDM.2.2 c. Pengembangan Generasi Lingkungan Berkas yang berkaitan dengan penyelenggaraan: - Pembentukan tim verifikasi Pengembangan generasi lingkungan - Pentanai Pengembangan generasi lingkungan - Penghargaan lingkungan (Kalpataru, Adiwiyata Mandiri dan Nasional, Satalencana Pembangunan, Bangun Praja)	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	- - - - - - - - - - - -	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan BP2SDM	
4		PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA a. Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning - Perumusan kebijakan perencanaan - Pembertan akreditasi - Penyusunan Kerjasama - Pengembangan secara elektronik - Penyusunan dokumen evaluasi dan pengembangan diklat b. Penyelenggaraan Diklat Teknis - Pelaksana Diklat Fungsional - Pelaksana Kebijakan Fungsional c. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi - Pelaksana Diklat Administrasi - Pelaksana diklat kepemimpinan	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	- - - - - - - - - - - -	Pusat SDM LHK BP2SDM	
XII	LIT	PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI						
1	LIT.0 LIT.0.0	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN a. Program dan Evaluasi - Penyusunan program, anggaran dan kerjasama penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pengelolaan hutan - Proposal penelitian tim peneliti - Rencana penelitian tim peneliti - Rencana operasional penelitian, rencana penelitian dan Pengembangan integratif - Indikator kinerja program - Administrasi penelitian, penjabaran dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, TOR/ proposal, pembentukan tim kerja, dan surat menyurat - Monitoring Penelitian - Evaluasi Penelitian	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	- - - - - - - - - - - -	P3H P3H P3H P3H P3H P3H P3H P3H P3H P3H P3H P3H	

Page 60

1	2	3	4	5	6	7	8	
NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
		- Rekomendasi Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3H	
	LIT.0.1	b. Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian - Pengelolaan data hasil penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3H	
		- Pembinaan dan pengendalian teknis penelitian - Penyiapan bahan Pengembangan dan Inovasi	Biasa Terbatas	Eselon IV Eselon III	Terbuka Terbatas	- Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3H P3H	
		- Penyiapan bahan hak kekayaan intelektual	Rahasia	Eselon II	Terlutup	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	P3H	
		- Pengelolaan laboratorium - Pengelolaan hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka	- -	P3H P3H	
		- Ijin penelitian - Bimbingan Teknis Penelitian - Data Mentah Hasil Penelitian	Biasa Biasa Rahasia	Eselon IV Eselon IV Eselon II	Terbuka Terbuka Terlutup	- - Memiliki dampak yang mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	P3H P3H P3H	
		- Hasil Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3H	
		- Analisis Hasil Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3H	
		- Laporan Hasil Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3H	
	LIT.0.2	c. Kerjasama dan Diseminasi - Penyajian kerjasama penelitian - Diseminasi dan publikasi hasil penelitian, Pengembangan dan Inovasi antara lain: seminar, gelar teknologi dan pameran - Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka	- - -	P3H P3H P3H	

Page 61

1	2	3	4	5	6	7	8	
NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
2	LIT.1 LIT.1.0	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HASIL HUTAN a. Program dan Evaluasi - Penyusunan program, anggaran dan kerjasama penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pengelolaan hasil hutan - Proposal penelitian tim peneliti - Rencana penelitian tim peneliti - Rencana operasional penelitian, rencana penelitian dan Pengembangan integratif - Indikator kinerja program - Administrasi penelitian, pengkajian dan Pengembangan meliputi : rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja, dan surat menyurat - Monitoring Penelitian - Evaluasi Penelitian - Rekomendasi Penelitian	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbatas	- - - - - - - Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3HH P3HH P3HH P3HH P3HH P3HH P3HH P3HH	
	LIT.1.1	b. Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian - Pengelolaan data hasil penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3HH	
		- Pembinaan dan pengendalian teknis penelitian - Penyiapan bahan Pengembangan dan Inovasi	Biasa Terbatas	Eselon IV Eselon III	Terbuka Terbatas	- Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3HH P3HH	
		- Penyiapan bahan hak kekayaan intelektual	Rahasia	Eselon II	Terlutup	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	P3HH	
		- Pengelolaan laboratorium - Pengelolaan hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka	- -	P3HH P3HH	
		- Ijin penelitian - Bimbingan Teknis Penelitian - Data Mentah Hasil Penelitian	Biasa Biasa Rahasia	Eselon IV Eselon IV Eselon II	Terbuka Terbuka Terlutup	- - Memiliki dampak yang mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	P3HH P3HH P3HH	
		- Hasil Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3HH	

Page 62

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		- Analisis Hasil Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3HH	
		- Laporan Hasil Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3HH	
	LIT.1.2	c. Kejasama dan Diseminasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3HH	
		- Penyusunan kerja sama penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3HH	
		- Diseminasi dan publikasi hasil penelitian, Pengembangan dan Inovasi antara lain: seminar, gelar teknologi dan pameran	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3HH	
		- Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3HH	
3	LIT.2 LIT.2.0	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN						
		a. Program, Evaluasi dan Diseminasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Penyusunan rencana, program anggaran penelitian, Pengembangan dan Inovasi kualitas lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, diseminasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, Pengembangan dan Inovasi kualitas lingkungan dan Pengelolaan laboratorium lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Rencana penelitian tim peneliti	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3KLL	
		- Laporan hasil penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Seminar hasil penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Publikasi jurnal ilmiah serta gelar teknologi dan pameran	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Administrasi penelitian, pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja, dan surat menyurat	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Monitoring Penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Evaluasi Penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Rekomendasi Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3KLL	
	LIT.2.1	b. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Pengujian kualitas lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Laporan Pengembangan metode pengujian kualitas lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Laporan pelaksanaan deposit asam	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Sertifikasi hasil uji	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Bimbingan Teknis Penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	

Page 03

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		- Data Mentah Hasil Penelitian	Rahasia	Eselon II	Terutup	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	P3KLL	
		- Hasil Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3KLL	
		- Analisis Hasil Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3KLL	
		- Laporan Hasil Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3KLL	
	LIT.2.2	c. Metrologi dan Kalibrasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Pengelolaan metrologi lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Pembuatan bahan acuan dan uji profisiensi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Penyelenggaraan uji profisiensi serta Pengembangan kalibrasi peralatan laboratorium	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Laporan hasil kegiatan kalibrasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Sertifikasi hasil kalibrasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
		- Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3KLL	
4	LIT.3 LIT.3.0	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI, KEBUJAKAN DAN PERUBAHAN IKLIM						
		a. Program dan Evaluasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran penelitian, Pengembangan dan Inovasi sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Penyusunan evaluasi dan pelaporan, sintesa hasil penelitian, Pengembangan dan Inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kesehatan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Proposal penelitian tim peneliti	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Rencana penelitian tim peneliti	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Rencana operasional penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Rencana penelitian dan Pengembangan integratif	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Indikator kinerja program	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Administrasi penelitian, pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja, dan surat menyurat	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Monitoring Penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Evaluasi Penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	

Page 04

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Rekomendasi Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3SEKPI	
	LIT.3.1	b. Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian						
		- Pengelolaan data hasil penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3SEKPI	
		- Pembinaan dan pendampingan teknis penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Penyediaan bahan Pengembangan dan Inovasi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3SEKPI	
		- Pengelolaan hak kekayaan intelektual	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	P3SEKPI	
		- Pengelolaan laboratorium	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Ijin penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Bimbingan Teknis Penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Data Mentah Hasil Penelitian	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	P3SEKPI	
		- Hasil Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3SEKPI	
		- Analisis Hasil Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3SEKPI	
		- Laporan Hasil Penelitian	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang mengganggu tugas fungsi organisasi	P3SEKPI	
	LIT.3.2	c. Kerjasama dan Diseminasi						
		- Penyediaan kerja sama penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Diseminasi dan publikasi hasil penelitian, Pengembangan dan Inovasi antara lain: seminar, gelar teknologi dan pameran	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	
		- Forum komunikasi penelitian dan Pengembangan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	P3SEKPI	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIII	STD	STANDARISASI LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN						
1	STD.0	a. Pengembangan Standar Pengelolaan						
	STD.0.0	- Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Penyusunan standar pelayanan masyarakat dalam menunjang pola konsumsi dan produksi berkelanjutan termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
	STD.0.1	b. Penerapan Standar Pengelolaan						
		- Laporan pelaksanaan dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penerapan standar Pengelolaan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Laporan pelaksanaan penitisan kesesuaian standar Pengelolaan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
2	STD.1	STANDARISASI PRODUK						
	STD.1.0	a. Pengembangan Standar Produk						
		- Penyusunan RSNI produk,	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Pemanfaatan barang/jasa ramah lingkungan dalam menunjang pola konsumsi dan produksi berkelanjutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
	STD.1.1	b. Penerapan Standar Produk						
		- Buku panduan swadeklarasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Buku pernyataan lembaga verifikasi ekolabel	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Leaflet SNI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Katalog SNI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- prosiding Diseminasi SNI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Data Registrasi Produk	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Fasilitas penerapan SNI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Data Registrasi Lembaga Verifikasi Ekolabel	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
3	STD.2	STANDARISASI TEKNOLOGI DAN PENGUJIAN						
	STD.2.0	a. Pengembangan Standar Teknologi dan Pengujian						
		- Penyusunan RBTU teknologi dan pengujian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam menunjang pola konsumsi dan produksi berkelanjutan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
	STD.2.1	b. Penerapan Standar Teknologi dan Pengujian						
		- Registrasi laboratorium lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Publikasi police brief dan info brief (seperti leaflet, brosur dan lain-lain)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- SNI kualitas lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Registrasi teknologi ramah lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
		- Registrasi teknologi kehutanan ramah lingkungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pustanlinghut	
XIV	PPH	PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN						
1	PPH.0	ANALISIS PEMBIAYAAN KEHUTANAN						
	PPH.0.0	a. Analisis Pinjaman						
		- Dokumen penilaian/verifikasi proposal pinjaman fasilitas dana bergulir,	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BLU-PPH	
		- Dokumen verifikasi cek lapangan fasilitas dan pinjaman dana bergulir,	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BLU-PPH	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen penyusunan surat persetujuan prinsip pinjaman fasilitas dana pinjaman Fasilitas Dana Bergulir (FDB), - Dokumen penyusunan naskah peraturan skema pinjaman, a) Dokumen permohonan FDB Skema Pinjaman b) Dokumen Penilaian FDB Skema Pinjaman 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BLU-PPH	
		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perjanjian ketasama dengan lembaga perantara dalam rangka penyaluran pinjaman FDB 	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
	PPH.0.1	<ul style="list-style-type: none"> b. Analisis Bagi Hasil dan Syarat - Dokumen penilaian/verifikasi proposal pinjaman fasilitas dana bergulir dengan bagi hasil, - Dokumen verifikasi cek lapangan fasilitas dan bagi hasil dana bergulir, - Penyusunan naskah/ surat persetujuan prinsip bagi hasil FDB, 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BLU-PPH	
		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perjanjian ketasama dengan lembaga perantara dalam rangka penyaluran pinjaman FDB 	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan naskah perjanjian skema bagi hasil, a) Dokumen Permohonan FDB Skema Bagi Hasil b) Dokumen Penilaian FDB Skema Bagi Hasil 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BLU-PPH	
			Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
2	PPH.1 PPH.1.0	ANALISIS PEMBIAYAAN INVESTASI LINGKUNGAN <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Jenis Peralatan Ramah Lingkungan, - Daftar Inventarisasi potensi penyaluran (pipe line) pembiayaan investasi lingkungan - Formulir permohonan pembiayaan - Proposal permohonan pembiayaan, dokumen kelengkapan administrasi, berita acara kunjungan, - Laporan hasil desk analysis, Laporan penilaian analisis kelayakan teknis, verifikasi dan klarifikasi - Dokumen rekomendasi Tim Komite, - Dokumen surat persetujuan atau penotakan pembiayaan, dokumen surat penawaran kepada calon nasabah 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BLU-PPH	
			Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BLU-PPH	
			Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
			Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
			Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	

Page 07

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja lingkungan dari nasabah 	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan data dan informasi penerima pembiayaan investasi lingkungan 	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen legalitas penerima pembiayaan investasi lingkungan 	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja lingkungan dari penerima pembiayaan investasi lingkungan 	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
	PPH.1.1	<ul style="list-style-type: none"> b. Analisis Finansial - Rekomendasi teknis program Debt for Nature Swap (DNS), - Hasil audit oleh auditor independen, 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BLU-PPH	
			Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
		<ul style="list-style-type: none"> - Hasil monitoring dan evaluasi program DNS, - Laporan program DNS, - Dokumen kelayakan analisis finansial kelayakan usaha dan kesesuaian harga, 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BLU-PPH	
			Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BLU-PPH	
			Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
		<ul style="list-style-type: none"> - Data dan informasi nasabah pembiayaan investasi lingkungan. 	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
3	PPH.2 PPH.2.0	OPERASIONAL <ul style="list-style-type: none"> a. Hakul dan Perikatan - Penyiapan naskah perjanjian pinjaman FDB, - Naskah akad kredit (notaris), - Penyaluran pinjaman FDB, - Data penyaluran dana pinjaman FDB untuk HTR, HR, HTL HKM/HD 	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
			Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas fungsi organisasi	BLU-PPH	
			Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BLU-PPH	
			Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BLU-PPH	

Page 08

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
1	PPH.2.1	b. Monitoring dan Evaluasi - Naskah Laporan monitoring evaluasi kinerja debitur penerima FDB, - Naskah Laporan pembinaan kapasitas debitur	Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka	- -	BLU-PPH BLU-PPH	
XV KKL RETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN								
1	KKL.0 KKL.0.0 KKL.0.1	SARANA DAN PERALATAN PEMBUKAAN WILAYAH DAN PEMANFAATAN HUTAN a. Berkas Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah b. Berkas Sarana dan Peralatan Pemanfaatan Hutan	Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka	- -	KKL KKL	
2	KKL.1 KKL.1.0 KKL.1.1	SARANA DAN PERALATAN PERLINDUNGAN HUTAN a. Berkas Sarana dan Peralatan Pengamanan Hutan dan Evakuasi b. Berkas Sarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan dan Pengendalian Hama Penyakit	Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka	- -	KKL KKL	
3	KKL.2 KKL.2.0 KKL.2.1	SARANA DAN PERALATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP a. Berkas Sarana dan Peralatan Pengelolaan Pemantauan Kualitas b. Berkas Sarana dan Peralatan Pengelolaan Pengendalian Pencemaran dan	Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka	- -	KKL KKL	
XVI KKS KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIS								
1	KKs.0 KKs.0.0	BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT a. Perekonomian - Pengumpulan dan pengolahan bahan penyajian koordinasi penyusunan program, kebijakan strategis, analisis, harmonisasi, evaluasi dan Supervisi, serta pemberian bimbingan teknis kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian.	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusjakstra	
	KKs.0.1	b. Kesejahteraan Rakyat - Pengumpulan dan pengolahan bahan penyajian koordinasi penyusunan program, kebijakan strategis, analisis, harmonisasi, evaluasi dan Supervisi, serta pemberian bimbingan teknis kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang kesejahteraan rakyat.	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusjakstra	
2	KKs.1 KKs.1.0 KKs.1.1	BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, DAN AGENDA GLOBAL a. Politik, Hukum dan Keamanan - Pengumpulan dan pengolahan bahan penyajian koordinasi penyusunan program, kebijakan strategis, analisis, harmonisasi, evaluasi dan Supervisi, serta pemberian bimbingan teknis kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang politik, hukum, dan keamanan.	Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka	- -	Pusjakstra Pusjakstra	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
1	DTN	DATA DAN INFORMASI						
XVII DTN DATA DAN INFORMASI								
1	DTN.0 DTN.0.0	PENGELOLAAN DATA a. Basis Data - Laporan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SILHKD) - Naskah Akademik Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) - Evaluasi pemaparan SILHD - Dokumen Data SLHD - Analisa Data Kebakaran Hutan dan Lahan - Dokumen Monitoring dan Evaluasi SILHKD	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	- - - - -	PUSDATIN PUSDATIN PUSDATIN PUSDATIN PUSDATIN	
	DTN.0.1	b. Jaminan Kualitas Data - Laporan persiapan pelaksanaan Kiring Data - Kiring Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Ekoregion Sumatera - Kiring Data IKLH Ekoregion Jawa - Kiring Data IKLH Ekoregion Bali - Nusa - Kiring Data IKLH Ekoregion Kalimantan - Kiring Data IKLH Ekoregion Sulawesi - Kiring Data IKLH Ekoregion Papua	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	- - - - - -	PUSDATIN PUSDATIN PUSDATIN PUSDATIN PUSDATIN PUSDATIN	
	DTN.0.2	c. Analisis Data - Laporan Data Mining untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia - Laporan Data Mining Energi Alternatif	Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka	- -	PUSDATIN PUSDATIN	
2	DTN.1 DTN.1.0 DTN.1.1	PENGELOLAAN INFORMASI a. Analisis Informasi - Laporan penyusunan Statistik Kehutanan Kementerian LHK - Penyajian Data dan Informasi Website Kementerian LHK - Laporan Informasi Ekspor Import Komoditi Kehutanan	Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka	- - -	PUSDATIN PUSDATIN PUSDATIN	
	DTN.1.1	b. Penyajian Informasi - Dokumen IKLH Nasional - Laporan Penyempurnaan Perhitungan IKLH - Dokumen Perhitungan IKLH - Draf Dokumen IKLH - Pedoman Penyusunan IKLH	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	- - - - -	PUSDATIN PUSDATIN PUSDATIN PUSDATIN PUSDATIN	
	DTN.1.2	c. Perpustakaan - Laporan Pengembangan perpustakaan Digital - Laporan Penylangan Koleksi Perpustakaan - Laporan Pembinaan Layanan Perpustakaan	Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka	- - -	PUSDATIN PUSDATIN PUSDATIN	
3	DTN.2 DTN.2.0	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI a. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan - Data satker yang memiliki struktur jaringan dan teknologi informasi - Laporan Pengintegrasian Jaringan LHK dengan K/L/I lain - NSPK/Manuai/Juknis/Juklak Pengelolaan Jaringan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdatin	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	DTR.2.1 DTR.2.2	b. Pengembangan Aplikasi - Pengintegrasian dan Pengembangan Aplikasi Kementerian LHK - Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Portal Kementerian LHK - Laporan Pengembangan/Pengintegrasian Jaringan Pusat dengan Ekoregion c. Pengamanan Sistem Informasi - Data Indeks Keamanan Informasi - NSPK/Manusi/Juknis/Juklak Keamanan Informasi - Laporan Integrasi Database Sistem Informasi Pusat - Laporan Integrasi Database Sistem Informasi Daerah	Biasa Rahasia	Eselon IV Eselon II	Terbuka Tertutup	- Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Pusdatin Pusdatin	
XVII PPE PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION								
1	PPE.0 PPE.0.0 PPE.0.1 PPE.0.2	INVENTARISASI DAYA DUKUNG, DAYA TAMPUNG, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN a. Hutan dan Hasil Hutan b. Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan c. Transportasi, Manufaktur, Industri, dan Jasa	Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka	- - -	PPE PPE PPE	Kecuali peta format SHP Tertutup
2	PPE.1 PPE.1.0 PPE.1.1 PPE.1.2	PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN a. Hutan dan Hasil Hutan b. Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan c. Transportasi, Manufaktur, Industri, dan Jasa	Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka	- - -	PPE PPE PPE	
3	PPE.2 PPE.2.0 PPE.2.1 PPE.2.2	EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LINGKUNGAN a. Evaluasi b. Uji Kualitas Lingkungan c. Tindak Lanjut	Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Terbuka Terbuka Terbuka	- - -	PPE PPE PPE	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P. 85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ARSIP KEGIATAN FASILITATIF

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	1	KEPEGAWAIAN						
1	PEG.0.0	Formasi Pegawai a. Usulan dari Unit Kerja b. Usul Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN c. Penetapan Formasi dari Menpan dan RB d. Penetapan Formasi e. Penetapan Formasi Khusus	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian dan Organisasi	
2	PEG.0.1	Pengadaan Pegawai a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1) Proses Penunjukan Pegawai, meliputi : - Pengumuman - Seleksi administrasi - Pemanggilan peserta tes - Pelaksanaan ujian tertulis - Keputusan hasil ujian - Keputusan hasil uji kompetensi bidang - Wawancara 2) Penetapan Pengumuman Kelulusan 3) Berkas Lamaran yang Tidak Diterima 4) Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP 5) Nota Usul Pengangkatan CPNS Menjadi PNS lebih 2 Tahun 6) Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Proses Penunjukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian dan Organisasi	
3	PEG.1 PEG.1.0	Pembinaan Karier Pegawai a. Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Ijin Belajar Pegawai - Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin - Laporan Kegiatan Pengembangan Diri b. Surat Tanda Tamal Pendidikan dan Latihan (STTP/Ly/Sertifikat)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian/ Pusdik/Puslatmas	
	PEG.1.1 PEG.1.2	c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) /Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	Tertabas Tertabas	Eselon III Eselon III	Tertabas Tertabas	privasi privasi	Biro/Pusat/Setdit/ Setbidan Biro/Pusat/Setdit/ Setbidan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	PEG.0	Berkas Perseorangan PNS <ul style="list-style-type: none"> - Lamaran yang diterima - Nota Penetapan NIP dan kelengkapannya - Nota Persetujuan/Perimbangan Kepala BKN - SK Pengangkatan CPNS - Hasil Pengujian Kesehatan - SK Pengangkatan PNS - SK Kenalkan Pangkat - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan - SK Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/ Fungsional - SK Perpindahan Wilayah Kerja - SK Perpindahan Antar Instansi - SK Peningkatan Masa Kerja - SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) - Berita Acara Pemeriksaan - SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS - SK Perbaikan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk - SK Penarikan Kembali dari Perbaikan/Dipekerjakan - SK Pembertan Uang Tunggu - SK Pemberhentian Sebagai PNS - SK Pemberhentian/Pembebasan Sementara - SK Pengangkatan/ Pemberhentian sebagai Pejabat Negara - SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Dlangkat sebagai Pejabat Negara - SK Pengalihan PNS - Surat Keterangan Pernyataan PNS yang Hilang - Surat Keterangan Kembalinya PNS yang Dinyatakan Hilang - SK Penggantian Nama - Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran - Akta Nikah/Cerai - Akta Kelahiran - Isian Formulir PUPNS - Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan - Surat Permohonan Ijin Menjadi Anggota Parpol/Ormas/LSM - Surat Pencabutan Ijin Menjadi Anggota Parpol/Ormas/LSM - Surat Keterangan Menggagal Dunia - Surat Keterangan Mulas Keluarga - Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan - Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional - Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus - Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala - Surat Tugas/Ijin Belajar Dalam/Luar Negeri - Surat Ijin Berpergian ke Luar Negeri - Kartu Pendaftaran Uang (Kardaf) PNS - Kartu Induk Pegawai 	Rahasia	Eselon II	Terlutup	Privasi	Biro Kepegawalan dan Organisasi	

Page 73

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah/Sertifikat - SK Penempatan/Penarikan Pegawai - SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan di luar Instansi Induk - Surat Perimbangan Status PNS - SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS - Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena Dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah - SK Pensiun 	Rahasia	Eselon II	Terlutup	Privasi	Biro Kepegawalan dan Organisasi	
II	OTL	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA						
1		Struktur organisasi pada : Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembangunan a. Pembentukan b. Perubahan c. Pembubaran	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawalan dan Organisasi	
2	OTL.1 OTL.1.0 OTL.1.1 OTL.1.2 OTL.1.3 OTL.1.4 OTL.1.5	Perumusan Jabatan - Analisa jabatan - Urutan jabatan - Klasifikasi jabatan - Evaluasi jabatan - Evaluasi kinerja - Sistem karier	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawalan dan Organisasi	
3	OTL.2	Tata Laksana mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia, pengarahan, koordinasi, laporan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawalan dan Organisasi	
4		Evaluasi kelembagaan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawalan dan Organisasi	
5		Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawalan dan Organisasi	
III	SET	KESEKRETARIATAN						
1	SET.0 SET.0.0	Kerumahtanggaan Keterliban dan keamanan 1) Pengamanan, penjagaan dan pengawal terhadap pejabat, kantor, dan rumah a) Daftar nama satuan pengamanan b) Daftar jaga/daftar piket c) Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian d) Surat Ijin keluar masuk orang atau barang	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	

Page 70

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2) Laporan keterlibatan dan keamanan a) Kehilangan b) Kerusakan c) Kecelakaan d) Gangguan						
b	SET.0.1	Pemeliharaan gedung dan taman: - Pertamanan/landscaping - Penghijauan - Perbaikan gedung - Perbaikan rumah dinas/wisma - Kebersihan gedung dan taman	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
c	SET.0.2	Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon, televisi kabel dan komputer: - Perbaikan/pemeliharaan - Pemasangan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
d		Telekomunikasi: Administrasi penggunaan/tanggungan peralatan telekomunikasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
e	SET.0.3	Perjalanan dinas: - Dalam negeri - Luar negeri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
f	SET.0.4	Kendaraan dinas dan bus antar jemput: - pengurusan surat-surat kendaraan dinas - pemeliharaan dan perbaikan - pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
g	SET.0.5	Keprotokolan: 1) Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) 2) Buku Tamu 3) Agenda kegiatan pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4) Kunjungan dinas dalam dan luar negeri a) Kunjungan dinas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan b) Kunjungan dinas Eselon I c) Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai 5) Daftar nama/alamat kantor/pejabat	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
h	SET.0.6	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dan fasilitas kantor lainnya	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
2	SET.1	Ketatausahaan						
a	SET.1.0	Persuratan meliputi: pemberitahuan pindah kantor, penambahan nomor	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	SET.1.1	Pengandaan meliputi: penyusunan desain, pencetakan, penjiilan, serta	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
c	SET.1.2	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
d	SET.1.3	Risalah/holulen rapat 1) Rapat Pimpinan Kementerian 2) Rapat staf	Rahasia	Eselon II	Terbuka	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Umum	
e	SET.1.4	Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
f	SET.1.5	Administrasi pengelolaan parkir	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
g	SET.1.6	Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, dan pegawai lainnya	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
3	SET.2	Kearsipan						
a	SET.2.0	Sistem Kearsipan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
b	SET.2.1	Administrasi dalam rangka penyusunan sampai dengan penetapan sistem Pengelolaan Kearsipan 1) Administrasi persuratan/Ketatalaksanaan a) Buku agenda/kartu kendali b) Lembar pengantar/buku ekspedisi c) Formulir/catatan permintaan dan layanan pengandaan dokumen/arsip 2) Pengolahan, Penyimpanan, pemeliharaan, perawatan dan konservasi arsip a) Daftar arsip b) Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi) c) Daftar pencarian arsip	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
c		Penyusunan arsip 1) Pemindahan arsip inaktif - Berita acara pemindahan - Daftar arsip yang dipindahkan 2) Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna - Berita acara pemusnahan - Daftar arsip yang dimusnahkan - Rekomendasi/pertimbangan/ pemusnahan arsip dari instansi terkait - Surat Keputusan pemusnahan 3) Pengolahan arsip statis - Berita acara serah terima arsip - Daftar arsip yang diserahkan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
d	SET.2.2	Pengembangan kearsipan meliputi: pengembangan sumber daya manusia dan teknologi kearsipan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
e	SET.2.3	Layanan jasa kearsipan (peminjaman, penggunaan arsip)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
f	SET.2.4	Pembinaan kearsipan: - Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan/lokakarya/workshop - Bimbingan teknis	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
0		- Supervisi dan monitoring Persejuaan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
IV	KAP	PERLENGKAPAN						
1.	KAP.0 KAP.0.0 KAP.0.1 KAP.0.2	Analisa Kebutuhan a. Data kebutuhan b. Analisa Data c. Rencana Kebutuhan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
2	KAP.1 KAP.1.0 KAP.1.1 KAP.1.2 KAP.1.3 KAP.1.4 KAP.1.5 KAP.1.6 KAP.1.7	Pengadaan Barang Dokumen mulai dari perencanaan, pengadaan (HPS, spesifikasi teknis, a. Alat Tulis Kantor b. Peralatan Rumah Tangga c. Peralatan Kantor d. Kendaraan Mobilitas e. Prasarana Fisik (vital) f. Sarana Komunikasi/Informasi g. Sarana Khusus antara lain : pesawat terbang, helikopter, pemadam kebakaran, speedboat. h. Sarana Penelitian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
3	KAP.2	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) a. SIMAK BMN b. Pembelian BMN - Daftar barang kuasa/ pengguna - Kartu identitas barang - Buku penerimaan FNBP c. Daftar barang ruangan d. Inventarisasi BMN - Keputusan pembentukan lms - Rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi - Kertas kerja inventarisasi - Berita acara inventarisasi - Daftar Inventaris/Buku barang/Daftar barang lainnya - Laporan hasil inventarisasi e. Laporan BMN - Laporan kondisi barang - Laporan barang kuasa pengguna - Berita acara rekonstasi eksternal dan internal - Laporan barang persediaan tidak habis pakai - Laporan barang persediaan habis pakai	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	

Page 79

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	KAP.3	Penghapusan, Pemindahtanganan, dan Hibah BMN - Perencanaan - Penetapan - Penghapusan - Pemindahtanganan - Hibah - Laporan Dokumen kepemilikan aset/kekayaan Kementerian LHK : - Aset Tetap - Sertifikat tanah, IMB, Blueprint - Barang Bergerak STAK SPKS	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Umum	
			Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Umum	
			Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum	
V	DIK	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1	DIK.0 DIK.0.0 DIK.0.1 DIK.0.2	Kebutuhan Diklat a. Analisa Diklat b. Program c. Pengembangan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat	
2	DIK.1 DIK.1.0 DIK.1.1 DIK.1.2	Peserta a. Rencana b. Peryanatan c. Seleksi dan Penerimaan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat	
3	DIK.2 DIK.2.0 DIK.2.1 DIK.2.2 DIK.2.3 DIK.2.4	Pengajaran a. Kurikulum, Silabus dan Modul b. Jadwal c. Sarana Pendidikan dan Pelatihan d. Pengajar/Widyaiswara e. Praktek	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat	
4	DIK.3 DIK.3.0	Penyelenggaraan Diklat a. Persiapan - Pembentukan panitia penyelenggara - Rapat persiapan penyelenggaraan Diklat	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat	
	DIK.3.1	b. Pelaksanaan Diklat - Surat Pemanggilan Peserta - Surat Keputusan Tim Penyelenggara Diklat - Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat - Panduan Diklat - Laporan Panitia Penyelenggara Diklat - Sambutan Pembukaan Penyelenggara Diklat - Daftar Peserta Diklat - Bahan Ajar Diklat - Daftar Hadir Peserta Diklat - Daftar Hadir Widyaiswara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat	

Page 80

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DK.3.2	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Evaluasi Diklat - Formulir Evaluasi Widyaiswara - Hasil Formulir Evaluasi Peserta Diklat - Sambutan Penutupan Diklat - Copy Sertifikat/STTPL dan transkrip nilai <p>c. Evaluasi Pasca Diklat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan penyelenggaraan Diklat - Evaluasi alumni pasca Diklat - Akreditasi pusat diklat - Sertifikasi Sumber Daya Manusia 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat	
5	DK.4 DK.4.0 DK.4.1 DK.4.2 DK.4.3 DK.4.4 DK.4.5	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat	
		<ul style="list-style-type: none"> a. Kurikulum, Silabus dan Modul b. Penemuan c. Kegiatan Belajar Mengajar d. Evaluasi dan Laporan e. Copy Ijazah dan transkrip nilai f. Penempatan 						
VI	KUM	HUKUM						
1	KUM.0 KUM.0.0 KUM.0.1 KUM.0.2 KUM.0.3 KUM.0.4 KUM.0.5	Perundang-undangan Republik Indonesia	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum	
		<ul style="list-style-type: none"> a. Produk Lembaga Tertinggi Negara b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Keputusan Presiden f. Instruksi Presiden 						
2	KUM.1 KUM.1.0 KUM.1.1 KUM.1.2 KUM.1.3 KUM.1.4 KUM.1.5 KUM.1.6 KUM.1.7 KUM.1.8 KUM.1.9 KUM.1.10 KUM.1.11 KUM.1.12	Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum	
		<p>Mulai dari Rancangan Awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum sampai dengan diundangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Bersama Menteri b. Keputusan Bersama Menteri c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan e. Instruksi/Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan f. Peraturan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala g. Keputusan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala h. Instruksi/Surat Edaran Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur i. Peraturan/Keputusan Pejabat setingkat Eselon II j. Instruksi/Surat Edaran Pejabat setingkat Eselon II k. Peraturan/Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar) l. Peraturan/Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis (Balai) m. Peraturan/Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 						

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	KUM.2 KUM.2.0 KUM.2.1 KUM.2.2 KUM.2.3 KUM.2.4	Surat Perintah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum	
		<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan b. Surat Perintah Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur c. Surat Perintah Pejabat setingkat Eselon II d. Surat Perintah Kepala Unit Pelaksana Teknis e. Surat Kuasa 						
4		Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat nasional/regional/institusional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum	
5		Pedoman penyelenggaraan persidangan dan rapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum	
6	KUM.3	Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan/MoU/Kontrak/Perjanjian Kerjasama/Ratifikasi di dalam negeri dan luar negeri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum, Pusat KLN	
7	KUM.4 KUM.4.0 KUM.4.1	Pidana	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum	
		<ul style="list-style-type: none"> a. Kejahatan Umum b. Kejahatan Khusus 						
8	KUM.5 KUM.5.0 KUM.5.1 KUM.5.2 KUM.5.3 KUM.5.4 KUM.5.5 KUM.5.6 KUM.5.7 KUM.5.8	Pidana	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum	
		<ul style="list-style-type: none"> a. Notaris b. Kedewasaan dan Perwalian c. Harta Kekayaan d. Benci dan Hak-hak yang timbul e. Hak Milik Kebendaan/Sertifikat/MB f. Kontrak g. Perikatan h. Jual beli i. Tukar menukar 						
9	KUM.6	Tata Usaha Negara	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum	
		Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran (proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, berkas pembelaan dan bantuan hukum, telah hukum dan opini hukum)						
10		Arbitrase	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum	
		Berkas tentang kasus/sengketa pidana maupun perdata, baik kejahatan maupun pelanggaran (proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, berkas pembelaan dan bantuan hukum, telah hukum dan opini hukum)						
11		Perjanjian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum	
		Berkas perjanjian sejak permohonan sampai dengan diberikannya surat (jin)						

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	KUM.7 KUM.7.0 KUM.7.1 KUM.7.2	Pembuktian dan Kadaluwarsa a. Pembuktian b. Kadaluwarsa c. Dispensasi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Hukum	
13	KUM.8 KUM.8.0 KUM.8.1 KUM.8.2 KUM.8.3 KUM.8.4 KUM.8.5	Sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum a. Hukum Agama b. Hukum Internasional c. Hukum Persepsi d. Baribus Hukum e. Hukum Adat f. Hukum Tata Usaha Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum	
14	KUM.9 KUM.9.0 KUM.9.1 KUM.9.2	Pelanggaran a. Pelanggaran Keamanan dan Keterlibatan Umum b. Pelanggaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan c. Pelanggaran Kesuksesan	Rahasia	Eselon II	Terlutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum	
15	KUM.10 KUM.10.0 KUM.10.1 KUM.10.2 KUM.10.3 KUM.10.4 KUM.10.5	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) a. Hak cipta b. Hak paten c. Hak Desain Industri d. Hak Rahasia Dagang e. Hak Merek Produk Lingkungan Hidup dan Kehutanan f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLS)	Rahasia	Eselon II	Terlutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum	
VII HMS HUBUNGAN MASYARAKAT								
1	HMS.0 HMS.0.0 HMS.0.1	Hubungan Lembaga Negara a. Hubungan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara b. Hubungan Lembaga Pemerintah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas	
2	HMS.1	Hubungan Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi a. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah menengah kejuruan, tenaga ahli, dll b. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah menengah kejuruan, pendidikan sistem ganda (PSG)/praktek kerja lapangan (PKL)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas	
3	HMS.2 HMS.2.0 HMS.2.1	Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan dan Pendapat Umum a. Hubungan Organisasi Kemasyarakatan/LSM b. Hubungan Media Massa dan Pendapat Umum - Saran pers/konferensi pers/press release/awawancara - Kunjungan wartawan/peliputan c. Hubungan dengan perusahaan d. Forum kehormatan (Bakohumas/Perhumas)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas	

Page 83

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	HMS.3 HMS.3.0	Penghargaan/tanda kenang-kenangan Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar f. Ucapan terima kasih, ucapan selamat, belisungkawa, permohonan maaf g. Dengar pendapat/hearing DPR/DPD-RI Publikasi dan Dokumentasi a. Publikasi - Perijinan publikasi - Publikasi melalui media cetak maupun elektronik - Penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal - Kliping koran - Brosur/leaflet/poster/plakat - Pengumuman/pemberitaan - Diseminasi (Seminar, lokakarya, dll) b. Dokumentasi Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Eselon I - Pejabat lain/pegawai c. Pameran Pameran/sayembara/tomba festival/pembuatan spanduk d. Bahan/Materi Pidato Pimpinan Bahan Persidangan dan Rapat (Bahan Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, - Bahan sidang kabinet - Rakor tingkat kementerian termasuk hasil rumusan dan transkrip - Bahan rapat terbatas kementerian - Pidato Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas	
VIII KLN KERJASAMA LUAR NEGERI								
1	KLN.0 KLN.0.0 KLN.0.1 KLN.0.2 KLN.0.3 KLN.0.4	Hubungan Kerjasama Luar Negeri dimulai dari peninjauan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan sampai dengan petaporan a. Hubungan Kerjasama Bilateral b. Hubungan Kerjasama Intra Kawasan c. Hubungan Kerjasama dengan PBB d. Hubungan Kerjasama dengan Non PBB e. Hubungan Kerjasama Organisasi Internasional Non Pemerintah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro KLN	Kecuali dokumen proses kerjasama luar negeri tertutup
2	KLN.1	Barbuan Teknis						

Page 84

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
	KLN.1.0	a. Bantuan Keuangan	Rahasia	Eselon II	Terutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Biro KLN	
	KLN.1.1	b. Bantuan Tenaga Ahli	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro KLN	
	KLN.1.2	c. Bantuan Beasiswa	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro KLN	
	KLN.1.3	d. Bantuan Prasarana Sarana	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro KLN	
3	KLN.2	Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Internasional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro KLN	
	KLN.2.0	a. Monitoring Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Internasional						
	KLN.2.1	b. Pembahasan Konvensi dan Perjanjian Internasional						
	KLN.2.2	c. Tindak Lanjut Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Internasional						
4	KLN.3	Kunjungan Misi Luar Negeri/Perwakilan Asing	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro KLN	
	KLN.3.0	a. Kunjungan Delegasi ke Luar Negeri						
	KLN.3.1	b. Penerimaan Kunjungan Misi/Perwakilan Asing						
	KLN.3.2	c. Penyediaan Bahan Informasi						
5	KLN.4	Peremuan ilmiah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro KLN	
		Kongres, konferensi, seminar dan/atau lokakarya yang terkait dengan kerjasama						
6	KLN.5	Promosi dan Investasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro KLN	
		promosi, investasi dan perdagangan internasional mulai dari perencanaan sampai						
IX	WAS	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN						
1	WAS.0	Rencana Pengawasan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Inspektorat	
	WAS.0.0	a. Rencana Strategis Pengawasan						
	WAS.0.1	b. Rencana Kerja Tahunan Pengawasan						
	WAS.0.2	c. Rencana Kinerja Tahunan Pengawasan						
	WAS.0.3	d. Penetapan Kinerja Tahunan Pengawasan						
	WAS.0.4	e. Raker Pengawasan Tingkat Nasional						
2	WAS.1	Pedoman Kebijakan Pengawasan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Inspektorat	
3	WAS.2	Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Inspektorat	
4	WAS.3	Pelaksanaan Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Inspektorat	
	WAS.3.0	a. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)						
	WAS.3.1	b. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)						

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WAS.3.2	c. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK)						
		- yang memerlukan tindak lanjut						
		- yang tidak memerlukan tindak lanjut						
	WAS.3.3	d. Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat						
	WAS.3.4	e. Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan						
	WAS.3.5	f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara						
	WAS.3.6	g. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan						
	WAS.3.7	h. Good Corporate Governance (GCG)						
5	WAS.4	Pemeriksaan Khusus	Rahasia	Eselon II	Terutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Inspektorat	
		Pemeriksaan khusus tentang penyelesaian kasus-kasus yang merugikan negara						
6	WAS.5	Kertas kerja pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	Rahasia	Eselon II	Terutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Inspektorat	
	WAS.5.0	a. Kertas kerja pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang perlu ditindaklanjuti						
	WAS.5.1	b. Kertas kerja pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang tidak perlu ditindaklanjuti						
7	WAS.6	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Inspektorat	
8	WAS.7	Satuan Pengawasan Intern (SPI/Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Inspektorat	
9	WAS.8	Hasil Analisis Laporan Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Inspektorat	
X	REN	PERENCANAAN						
1	REN.0	Rencana Strategis	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan	
	REN.0.0	a. Rencana Program Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional Pembangunan Jangka Menengah, Jangka Panjang, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Strategis, Rapel Nasional dimulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan						
	REN.0.1	b. Rencana Program Lingkungan Hidup dan Kehutanan Regional Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan tingkat regional						
	REN.0.2	c. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Jangka menengah nasional dimulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan						
2	REN.1	Penyusunan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan	
		Mulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan						

1 NO	2 KODE KLASIFIKASI	3 JENIS ARSIP	4 KLASIFIKASI KEAMANAN	5 HAK AKSES	AKSES PUBLIK	6 DASAR PERTIMBANGAN	7 UNIT PENGOLAH	8 KETERANGAN
3	REN.2 REN.2.0 REN.2.1 REN.2.2 REN.2.3	Evaluasi Program dan Kinerja a. Evaluasi Program Kementerian/Unit Kerja - Evaluasi Program Unit Kerja - Evaluasi Program Kementerian b. Penyusunan laporan hasil evaluasi c. Rapat Koordinasi Menteri di sidang Kabinet d. Evaluasi Kinerja Kementerian/Unit Kerja	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan	
4	REN.3	Kejasama Dalam Negeri Penyusunan, penganggaran monitoring, pengelolaan dalam negeri seperti	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SITI NURBAYA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		20) Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;						
		21) Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) dalam Kawasan Hutan Konservasi						
		22) Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;						
		23) Penggunaan Air Menunjang Kegiatan Industri (pertanian, kehutanan pariwisata, perkebunan, peternakan, panas bumi dll)						
		24) Iuran Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi						
		25) Pungutan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.						
		26) Kegiatan Perijinan Dibidang Perbenihan						
		27) Sertifikasi Benih;						
		28) Iuran Pengumpulan/Pengunduhan Benih dan Anak-anak Penerimaan dari Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anak-anak dalam Kawasan Hutan;						
		29) Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah						
		30) Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan;						
		31) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung						
		32) Perdagangan Satwa Liar Hasil Penangkaran di Hutan Lindung						
		33) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung;						
		34) Pungutan Kegiatan Penelitian di Hutan Lindung						
		35) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan air secara Komerstial pada Hutan Lindung						
		36) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Aliran Air secara Komerstial pada Hutan Lindung						
		37) Pungutan Usaha Pemanfaatan Aliran Air secara Komerstial pada Hutan Lindung;						
		38) Jasa Laboratorium						
		39) Produk Sampung Hasil Penelitian						
		40) Jasa Perpustakaan						
		41) Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terkait dengan Tugas dan Fungsi						
		42) Jasa Pendidikan dan Pelatihan di bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan						
		43) Jasa Akreditasi Lembaga Pendidikan dan atau Pelatihan di bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan;						
		44) Jasa Registrasi Kompetensi Nasional di bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan						
		45) Penerbitan Izin Lingkungan;						
		46) Penerbitan Izin Pengendalian Pencemaran Air;						
		47) Penerbitan Izin Pengelolaan Umbah Bahan Berbahaya dan Beracun						

Page 3

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45) Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun						
		49) Jasa Lainnya:						
		- Pendapatan yang berasal dari BLU Pusat P2H (Skema pinjaman, Skema Bagi Hasil, Skema Pola Syariah, Skema Pembiayaan Investasi Lingkungan)						
	e	Hibah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
	f	Pinjaman Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
	g	Pengelolaan Investasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
	h	Pengelolaan/Penatausahaan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
	i	Lain-lain pendapatan (Dana Kontingenst, Dana Bantuan, Dana Darurat, dll)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
2	KEU.1.1	Belanja						
		a. Dokumen Belanja Pegawai						
		1) Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
		2) Kartu Gaji	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Privasi	Biro Keuangan	
		b. Dokumen Belanja Barang/Jasa termasuk Dokumen-Dokumen						
		1) Belanja Barang Operasional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
		2) Belanja Barang Non Operasional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
		3) Belanja Jasa	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
		4) Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan/Peralatan dan mesin	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
		5) Belanja perjalanan dinas	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
		6) Belanja Barang Pelayanan Umum (BLU)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
		7) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
		Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara						
		- Pengumuman lelang						
		- Dokumen Prakuifikasi						
		- Dokumen Peninjauan Lapangan						
		- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan						
		- Berita Acara Pelelangan						
		- Usulan Calon Pemenang						
		- Penetapan Pemenang						
		- Surat Perintah Kerja (SPK)						
		- Kontrak/Addendum Kontrak						
		- Dokumen uang muka dan data pendukung						
		- Penagihan/Invoice, kwitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta data pendukungnya, antara lain: copy faktur pajak, nota kredit, dll						
		- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Barang						

Page 4

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya antara lain Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB)/Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya antara lain Nota Hasil Pengulan (NHP), Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)/ Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD)						
		c. Dokumen Belanja Modal 1) Tanah dan Bangunan 2) Barang Bergerak/Barang Inventaris Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara - Pengumuman lelang - Dokumen Prakuualifikasi - Dokumen Peninjauan Lapangan - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan - Berita Acara Pelelangan - Usulan Calon Pemenang - Penetapan Pemenang - Surat Perintah Kerja (SPK) - Kontrak/Addendum Kontrak - Dokumen uang muka dan data pendukung - Pengalihan Invoice / kwitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta data pendukungnya, antara lain: copy faktur pajak, nota kredit, dll - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Barang - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya antara lain Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB)/Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya antara lain Nota Hasil Pengulan (NHP), Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)/ Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
		d. Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan lampirannya : 1) SPP/SPP-UP/SPP-TUP 2) SPP/SPP-GUP/SPP-GTUP 3) SPP-LS	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Keuangan	
		e. Surat Perintah Membayar (SPM) dan lampirannya : 1) SPM/SPM-UP/SPM-TUP 2) SPM/SPM-GUP/SPM-GTUP 3) SPM-LS 4) SPM-GUGUP Nihil 5) SPM-TUTUP Nihil	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Keuangan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		f. Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Keuangan	
		g. Dokumen Pembukuan Anggaran yaitu : 1) Buku Kas Umum (BKU) 2) Buku Kas Pembantu (BKP)/Buku Pembantu (BP), antara lain: Buku Kasir/Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Persekit/Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku Pembantu Uang Perjalanan Dinas, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Pengawas Anggaran, Buku Pembantu LS 3) Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran 4) Rekening Koran Bank 5) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendaharawan 6) Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Keuangan	
		h. Penggunaan dana Pemerintah RI untuk kontribusi/urutan pada Badan atau Organisasi Internasional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
		i. Hutang Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
		j. Dokumen Penyerahan Modal Pemerintah (PMP) Pembangunan HTI	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Keuangan	
		k. Dokumen pinjaman dalam rangka Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Desa(HD), Hutan Komunitas (HKM), Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Usaha Pemanfaatan Hutan Alam dengan Teknik Pengayaan Silvokultur Intensif (SILIN), Usaha Restorasi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	BLU P2H	
		l. Dokumen Kredit Usaha, antara lain : Kredit Usaha Hutan Tanaman Rakyat (KUHTR), Kredit Usaha Kecil Daerah Aliran Sungai (KUKDAS), Kredit Usaha Persebaran Alam (KUPA)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Keuangan	
		m. Laporan Kas 1) Berita Acara Pemeriksaan Kas/Regiter Penutupan Kas 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) termasuk Arsp Data Komputer (ADK) 3) Laporan Pendapatan Negara 4) Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara dengan lampiran rekening koran						
		n. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2) Neraca 3) Laporan Arus Kas 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
D	KEU 2	BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI						
1		Dokumen permohonan pinjaman luar negeri (Blue Book)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	Kecuali dokumen proses tertutup
2		Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (Green book)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	Kecuali dokumen proses tertutup
3		Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) , dan sejenisnya	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	Kecuali dokumen proses tertutup
4		Dokumen Loan Agreement Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) seperti: draft agreement, legal opinion , surat menyurat dengan Lender, dsb.	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	Kecuali dokumen proses tertutup
5		Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri, a.l. usulan lunturn dana	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	Kecuali dokumen proses tertutup
6		Aplikasi penarikan dana Bantuan Luar Negeri (BLN) berikut lampirannya: a. Reimbursement b. Direct Payment/Transfer Procedure c. Special Commitment L/C Opening d. Special Account/Impres Fund e. Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Biro Keuangan	

Page 7

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		f. Notice of Disbursement						
7		Otorisasi penarikan dana (payment advice)	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Biro Keuangan	
8		Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu : SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Keuangan	
9		Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Notification of Contract, Project Implementation, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Biro Keuangan	
10		Staff Appraisal Report	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
11		Report /Laporan yang terdiri dari : - Progress Report - Monthly Report - Quarterly Report - Completion Report/Annual Report/Final Report	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
12		Completion Report/Annual Report	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
13		Laporan Hulung Negara : - Laporan Pembayaran Hulung Negara - Laporan Posisi Hulung Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
14		Kelenturan/beraturan yang menyangkut bantuan/pinjaman luar negeri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
E	KEU 3	PENGELOLAAN APENDANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (HLN)						
1		Keputusan Menteri tentang penetapan Pejabat Penerimaan Hibah: a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang(KPB) b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji d. Pejabat Penandatangan SPM e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran f. Pengelola Barang g. Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penetma Barang, Pelugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP), dan petugas lainnya	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
F	KEU 4	SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)						
1		Mandau Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) a. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	

Page 8

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)						
2		Arsip Data Komputer (ADK) dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
3		Daftar Transaksi (DT), Pengeluaran (PK), Penerimaan (PN), Dokumen Sumber (DS), Buku Jurnal (BJ), Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Permohonan Pencatatan Dana (SPZD), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari Pengeluaran (SPDR)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
4		Listing (Daftar Rekam Penerimaan) a. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) b. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
5		Buku Temuan dan Tindakan lain SAI, Rencana Aksi (Action Plan)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
6		Laporan Realisasi Bulanan SAI/Semesteran/Tahunan - Laporan Bulanan SAI 1) Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Laporan Semesteran 1) Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3) Laporan Arus Kas 4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 6) Opini - Laporan Tahunan 1) Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3) Laporan Arus Kas 4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 6) Opini	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
7		Laporan Realisasi Triwulan SAI dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Kuasa Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAKPPAEI), Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI), Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan	
8	KEU.5	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA						

Page 9

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)/Laporan Hasil Audit (LHA) atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Keuangan	
2		Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh: a. KPA b. Pejabat Eselon I	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Keuangan	
3		Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional oleh Inspektoral Jenderal: a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak Lanjut/Tanggapan LHP	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Keuangan	
4		Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara : a. Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Ganti Kerugian Negara untuk Bendahara b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)/Ganti Kerugian Negara untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pegawai Tidak Tetap (PPPK/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan/atau Pihak Ketiga	Terbatas	Eselon III	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi	Biro Keuangan	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SITI NURBAYA

Page 10